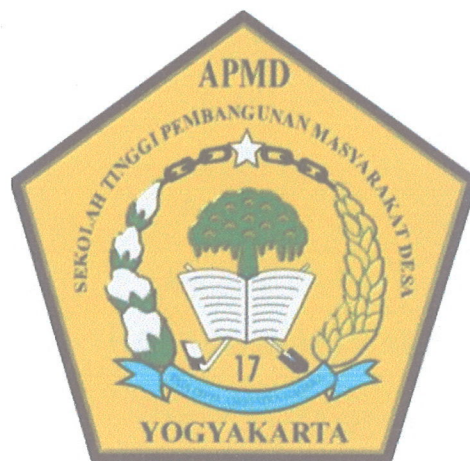


**PENGELOLAAN DESA WISATA UMBUL SIDOMULYO TERHADAP
KEMAKMURAN WARGA (KALURAHAN TIRTOMARTANI
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Diajukan Oleh:

Habbib Al Afzhar

Nim: 21520092

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

**PENGELOLAAN DESA WISATA UMBUL SIDOMULYO TERHADAP
KEMAKMURAN WARGA (KALURAHAN TIRTOMARTANI
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN)**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan,

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 Januari 2025

Jam : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

APMD

Nama

Tanda Tangan

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Ketua Penguji / Pembimbing

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., MA

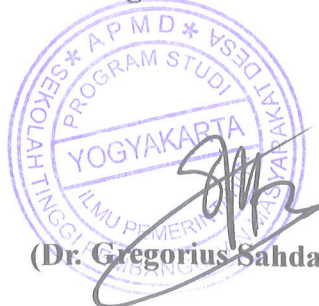
Penguji Samping I

Minardi, S.IP., M.Sc

Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habbib Al Afzhar

Nim : 21520092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, skripsi saya yang berjudul **“Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman”** adalah hasil karya tulis saya yang saya buat sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu (S-1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semoga data yang saya gunakan dalam penelitian telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan atau plagiat dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, Selasa 21 Januari 2025

Penulis



Habbib Al Afzhar

21520092

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Habbib Al Afzhar
NIM : 21520092
Telp : 081250757158
Email : habibalafzar@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*)** Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Yang

an



Habbib Al Afzhar

21520092

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

“Kalau orang lain bisa, maka kita juga pasti bisa”

(Nazarius Hardi)

“Orang tua di rumah menanti kepulangan dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka, simpan keluhanmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

(Ika df)

Jangan menganggap kendala sebagai masalah, jadikan sebagai tantangan dan taklukkan dengan keberanian”

(Habbib Al Afzhar)

“Teruslah berbuat baik meski terkadang ada orang yang hanya memanfaatkan kebaikan kita, karena semua kejadian pasti ada yang bisa dijadikan hikmah dan pembelajaran”

(Habbib Al Afzhar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usaha serta cinta dan kasih sayang kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan juga doa dari berbagai pihak, terutama :

1. Untuk kedua orang tua saya Bapak Nazarius Hardi dan Ibu saya Kamimi Asimah yang selama ini sudah mendidik saya dengan baik dan penuh kasih sayang, mengajarkan saya tentang menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan, dan juga terima kasih atas semua doa yang sudah menghantarkan saya sampai sejauh ini, atas segala perjuangan, tetes keringat dan air mata yang jatuh disetiap perjuangan, tidak memandang cuaca panas ataupun hujan, karena demi impian dan cita-cita saya dan atas semua hal yang sudah Bapak dan Mamak berikan kepada saya. apapun yang saya berikan tidak akan mampu membayar atas semua hal yang telah Bapak dan Mamak berikan. Tanpa doa, dukungan, perjuang, tetes keringat dan air mata dalam menuntun saya, belum tentu saya bisa menyelesaikan tugas skripsi ini. Mama tercinta.
2. Untuk kedua saudara/i saya Dessy Praditami Mesmiaty dan Agung Setiawan yang selama ini selalu memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Drs. Jaka Tri widaryanta, M.Si. terima kasih karena telah sabar dalam membimbing saya, untuk segala kebaikan yang telah Bapak berikan kepada saya semoga Tuhan membalaskan dengan memberikan kesehatan dan umur yang panjang, melindungi Bapak dimanapun Bapak berada. Tanpa bantuan dari Bapak, skripsi saya ini belum tentu bisa selesai tepat waktu.

4. Untuk kawan-kawan saya, Irenius Claudio siahaan, Fahmi raisridhoan Hsb, Geronsio Gracello Ada, Ananda Etho Giano, Yosias Usyor teman seperjuangan kuliah, yang selalu ada dalam susah dan senang, selama masa kuliah, yang selalu membantu dan menyulitkan dalam belajar tanpa kalian mungkin saya tidak bersemangat kuliah. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk kalian kawan.
5. Untuk Pemerintah Kalurahan Tirtomartani yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Dusun Brintikan
6. Untuk para Kelompok Sadar Wisata Umbul Sidomulyo karena telah membantu saya dalam memberikan informasi terkait data yang hendak saya cari untuk kebutuhan penelitian saya.
7. Untuk seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang selalu membantu dan mendukung saya disaat saya putus asa, selama penyusunan skripsi, yang selalu support dan memberi masukan untuk tetap bersemangat

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan Ridhonya saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman” dengan baik dan lancar.

Setulus hati penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan penulis dalam mengkaji masalah ini. Namun demikian, Skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik. Namun patut di syukuri karena banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil dalam penulisan Skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan Akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Drs. Jaka Tri widaryanta, M.Si. telah sabar membimbing penulis dengan sumbangan pikiran, pengetahuan serta gagasan yang mendukung dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., MA selaku Dosen Penguji samping I yang sudah menempatkan waktu untuk menguji Skripsi saya.

5. Bapak Minardi, S.IP., M.Sc. selaku Dosen Penguji samping II yang sudah menempatkan waktu untuk menguji Skripsi saya.
6. Bapak/ibu dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani penulis selama proses perkuliahan.
8. Pemerintah Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Demikian Skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 21 Januari 2025



Habib Al Afzhar

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| COVER..... | |
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| INTISARI..... | viii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Fokus Penelitian | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Literatur Review | 8 |
| G. Kerangka Konseptual..... | 17 |
| 1. Pemerintah | 17 |
| 2. Pemerintah Desa..... | 19 |
| 3. Governing | 22 |
| 4. Konsep Pengelolaan | 25 |
| H. Metode Penelitian..... | 27 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 27 |
| 2. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 27 |
| 3. Obyek Penelitian | 28 |

| | |
|---|----|
| 4. Subjek Penelitian..... | 28 |
| I. Metode Pengumpulan Data | 29 |
| a) Observasi | 29 |
| b) Wawancara..... | 30 |
| c) Dokumentasi | 30 |
| J. Teknik Analisis Data..... | 31 |
| a) Reduksi Data..... | 31 |
| b) Penyajian Data | 31 |
| c) Penarikan Kesimpulan | 31 |
| BAB II..... | 33 |
| DESKRIPSI UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI | 33 |
| A. Keadaan Geografis | 33 |
| 1. Sejarah Umum Kalurahan Tirtomartani..... | 33 |
| 2. Kondisi Geografis | 35 |
| 3. Batas-batas wilayah Kalurahan Tirtomartani adalah sebagai berikut: | 35 |
| 4. Pembagian wilayah Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Tirtomartani..... | 36 |
| B. Keadaan Demografi..... | 37 |
| 1. Jumlah penduduk | 37 |
| 2. Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomartani berdasarkan umur atau usia..... | 37 |
| C. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani..... | 38 |
| 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan | 38 |
| 2. Visi dan Misi Kalurahan Tirtomartani..... | 42 |
| 3. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan | 43 |
| D. Profil Desa Wisata Umbul Sidomulyo..... | 44 |
| 1) Sejarah Desa Wisata | 44 |
| 2) Struktur Organisasi Desa Wisata Umbul Sidomulyo Kalasan | 47 |
| | 47 |
| 3) Prinsip Desa Wisata umbul sidomulyo | 48 |
| 4) Kegiatan usaha desa wisata umbul sidomulyo | 49 |
| 5) Bentuk dan fungsi Desa wisata | 49 |
| 6) Status kepemilikan Desa wisata | 49 |
| 7) Struktur organisasi Desa wisata Umbul Sidomulyo | 50 |

| | |
|---|----|
| BAB III..... | 51 |
| PENGELOLAAN DESA WISATA UMBUL SIDMULYO TERHADAP KEMAKMURAN WARGA | 51 |
| A. Deskripsi Informan..... | 51 |
| B. Pelayanan Wisata Umbul Sidomulyo | 53 |
| C. Sumber dana Desa Wisata..... | 58 |
| D. Program Pemberdayaan Terhadap Pokdarwis | 63 |
| E. Perlindungan kepada pengunjung..... | 67 |
| F. Pengawasan dan Kontrol terhadap Desa Wisata | 71 |
| G. Dampak Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga | 79 |
| BAB IV | 86 |
| PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 88 |
| Daftar Pustaka..... | 90 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 92 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Profil Subjek Penelitian | 29 |
| Tabel 2. 1 Lurah yang pernah memimpin Tirtomartani | 34 |
| Tabel 2. 2 Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Tirtomartani..... | 36 |
| Tabel 2. 3 Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomartani Berdasarkan Jenis Kelamin | 37 |
| Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kalurahan Tirtomatani Berdasarkan umur/usia | 37 |
| Tabel 2. 5 Pamong Pemerintah Kalurahan Tirtomartani Berdasarkan Jabatan. | 40 |
| Tabel 3. 1 Narasumber yang menjadi Subjek Penelitian | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Pelayanan Desa Wisata yang dilakukan Pokdarwis | 55 |
| Gambar 3. 2 Pokdarwis Desa Wisata Umbul Sidomulyo ikutserta dalam seminar pelayanan Kepariwisataaan 2024 | 56 |
| Gambar 3. 3 Bukti kas Penerimaan Iuran Bulanan..... | 61 |
| Gambar 3. 4 Sosialisasi Media Marketing dan Workshop Terhadap Pokdarwis... | 66 |
| Gambar 3. 5 Inisiatif Pokdarwis ikut serta dalam seminar pengelolaan Desa Wisata..... | 67 |
| Gambar 3. 6 Surat Keputusan Lurah Tirtomartani | 75 |
| Gambar 3. 7 Lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah Di Umbul Sidomulyo | 81 |
| Gambar 3. 8 Kondisi jalan masuk dan keluar Desa Wisata Umbul Sidomulyo | 85 |

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo terhadap kemakmuran warga di Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Umbul Sidomulyo merupakan salah satu destinasi wisata berbasis swadaya masyarakat yang mengalami perkembangan pesat. Penelitian ini fokus mengkaji alasan mengapa Kalurahan Tirtomartani perlu menerapkan *Governing* dalam pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo serta bagaimana Kelompok Sadar Wisata memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" melalui penjelasan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dilakukan dengan sistem gotong royong dan musyawarah, mencerminkan pengelolaan berbasis masyarakat. Pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan desa wisata ini, sehingga Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) mengambil peran utama dalam pelayanan wisata, sumber pendanaan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan pengunjung dan pengawasan serta kontrol pengelolaan desa wisata. Gotong royong dan musyawarah masyarakat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti mata air dan lahan wisata, sekaligus meningkatkan solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan pengelolaan ini adalah partisipasi aktif masyarakat dan keberadaan Pokdarwis sebagai wadah pengelolaan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya keterlibatan dan *governing* pemerintah dan Penelitian ini menekankan pentingnya perbuatan pemerintah dalam pengelolaan desa wisata untuk memaksimalkan potensi wisata berbasis sumber daya bersama demi meningkatkan kemakmuran warga lokal.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Governing, Desa Wisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang tersebar. Dari setiap pulau yang ada di Indonesia memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda seperti bahasa, agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Selain itu memiliki Sumber Daya Alam (SDA), potensi dan keanekaragaman yang melimpah dapat mendukung perkembangan usaha pariwisata, yang memiliki peran sebagai perkembangan perekonomian dan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dalam pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan terdapat tiga nilai yang saling berhubungan yaitu, lingkungan, budaya, dan ekonomi. Tujuannya agar menciptakan Desa Wisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang membuka peluang besar untuk pengembangan pariwisata. Potensi ini dapat menarik wisatawan domestik dan asing, yang pada akhirnya akan menguntungkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Perhatian khusus harus diberikan oleh berbagai pihak dalam pengembangan pariwisata mengingat potensi besarnya. Pemerintah daerah dan desa harus berpartisipasi secara aktif dalam memajukan sektor ini, bukan hanya pemerintah pusat. Keuntungan berkelanjutan bagi komunitas setempat dapat dijamin melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengelola potensi wisata lokal.

Pariwisata tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal. Pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab di tingkat nasional atau daerah, tetapi juga dapat dilakukan oleh desa-desa melalui konsep desa wisata. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memaksimalkan potensi wisata mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran dan memperkuat identitas budaya setempat. Simamora dan Sinaga (2016:107) menekankan bahwa pengembangan kawasan desa wisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar jika dikelola dengan baik dan profesional.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 4.674 Desa Wisata di seluruh Indonesia, meningkat 36,7% dari 3.419 Desa Wisata pada tahun sebelumnya. Sulawesi Selatan memiliki Desa Wisata terbanyak dengan 480 desa, disusul oleh Jawa Timur dengan 453 desa. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya minat masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan Desa Wisata sebagai sektor penting yang berkontribusi besar terhadap perekonomian lokal dan nasional. Dengan bertambahnya jumlah Desa Wisata, peluang besar terbuka bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alam, budaya, serta potensi ekonomi lokal guna menarik lebih banyak wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Daerah Istimewa Yogyakarta istilah "desa" sekarang disebut "kalurahan". Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan inisiatif lokal. Kebebasan ini didasarkan pada tradisi atau hak asal-usul yang diakui oleh sistem pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, menyelenggarakan pembangunan, membina masyarakat, dan memajukan masyarakat. Keistimewaan ini didasarkan pada upaya masyarakat, hak asal-usul, dan kebiasaan desa. Tujuan pembangunan desa, menurut Pasal 78, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan pengurangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Potensi sumber daya alam merupakan solusi bagi pemerintah desa fokus pada pengembangan sektor pariwisata, yang menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling pesat. Sebagai industri modern, pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tugas penting pemerintah desa meliputi pengelolaan destinasi wisata serta menciptakan lingkungan yang mendukung inisiatif dan partisipasi masyarakat. Pariwisata juga menjadi salah satu strategi pengelolaan potensi desa, dengan kemampuan signifikan untuk membantu

mengurangi kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan yang kaya akan potensi wisata.

Yogyakarta, salah satu destinasi wisata terkenal di Pulau Jawa, memiliki banyak pilihan wisata dan ciri khas yang menarik. Wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup berbagai jenis rekreasi, termasuk wisata alam, budaya, belanja, agama, dan olahraga. Setiap jenis wisata memiliki atraksi yang unik dan menarik. Malioboro adalah salah satu objek wisata andalan Yogyakarta dan harapan besar untuk kemajuan sektor pariwisatanya. Tempat ini tidak hanya merupakan ikon kota tetapi juga merupakan pusat strategis untuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan matang. Dengan keadaan ini, berbagai ide inovatif untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan wisata datang dari pemerintah dan inisiatif masyarakat setempat. Untuk menghasilkan pengalaman wisata yang benar, pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif dalam pembangunan sektor pariwisata untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Salah satu Desa Wisata di Kabupaten Sleman Umbul Sidomulyo yang terletak di Dusun Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu Desa Wisata yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan perkembangan tersebut, Wisata Umbul Sidomulyo sudah terdaftar sebagai salah satu desa wisata rintisan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kabupaten Sleman pada 23 agustus tahun 2022. Namun, dalam dinamika pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo, terdapat permasalahan terkait *governing* atau perbuatan pemerintah dalam mengatur desa wisata ini. Hingga saat ini, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum sepenuhnya mengurus dan mengatur desa wisata dengan baik, meskipun sudah beroperasi selama lima tahun dan menggunakan tanah Kasultanan tanpa izin resmi. Fenomena ini menarik karena sering kali desa wisata dikelola secara swadaya oleh masyarakat, tetapi kemudian diklaim sebagai bagian dari program pemerintah desa atau pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata. Hal ini juga terjadi di Desa Wisata Umbul Sidomulyo, di mana pemerintah desa kurang terlibat dalam pengelolaan, tetapi ada kemungkinan

adanya hubungan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman yang memberikan dukungan terhadap keberlanjutan desa wisata ini.

Dinamika ini mencerminkan kebanyakan desa wisata sering berkembang tanpa intervensi langsung dari pemerintah desa, tetapi kemudian mendapatkan pengakuan dari Dinas Pariwisata. adanya potensi kerja sama dengan Dinas Pariwisata yang secara tidak langsung memberikan perlindungan dan dukungan bagi desa wisata Umbul Sidomulyo tersebut. Desa Wisata Umbul Sidmulyo merupakan destinasi wisata yang dikelola secara mandiri oleh salah satu pengusaha dan masyarakat Dusun Brintikan. Desa wisata Umbul Sidomulyo proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama selama 6 bulan pada tahun 2019 dan secara resmi baru bisa beroperasi pada tahun 2020 akhir. Masyarakat Tirtomartani khususnya di Dusun Brintikan memakai musyawarah dan gotong royong. Sehingga dalam pengelolaan aset wisata bersama yang dimiliki, semua pihak sadar akan perannya masing-masing dalam memajukan Desa Wisata di Umbul Sidomulyo. Selain sebagai inisiator, masyarakat sekitar juga sebagai eksekutor dalam pengelolaan desa wisata ini.

Pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dapat dikatakan ideal jika mengikuti paradigma dan adanya kolaborasi yang baik dalam pengelolaannya serta berfokus pada pertumbuhan berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proses perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan wisata ini dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat setempat, yang menunjukkan antusiasme dan kesadaran mereka terhadap potensi besar sumber daya alam yang dimiliki di Kalurahan Tirtomartani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi lokal, termasuk pariwisata, guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian desa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya Pasal 26, yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama.

Perencanaan dan pelaksanaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo sepenuhnya dikelola oleh masyarakat RT 08 Dusun Brintikan tanpa keterlibatan pemerintah

sejak awal. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Organisasi Desa Wisata yang menyatakan bahwa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, mereka merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Padahal, Desa Wisata Umbul Sidomulyo telah beroperasi selama 5 tahun.

Meskipun desa wisata ini telah ditetapkan oleh Kalurahan Tirtomartani sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan pada 20 Juni 2022, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam pengelolaannya. Selain itu, keberadaan desa wisata ini sebagian memanfaatkan tanah *Kasultanan Ground* dan sumber mata air yang digunakan dalam pembuatan umbul berada di wilayah Kalurahan Tamanmartani, bukan di Kalurahan Tirtomartani. Kondisi ini dapat memengaruhi keberlanjutan Desa Wisata Umbul Sidomulyo.

Kurangnya keterlibatan pemerintah membuat pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dilakukan sepenuhnya oleh warga setempat dan dianggap sebagai milik pribadi. Warga pun membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) secara mandiri. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya perbuatan pemerintah Kalurahan Tirtomartani seharusnya mengurus dan mengatur objek wisata ini dan berperan aktif dalam pengembangannya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, menarik untuk mengkaji mengapa Kalurahan Tirtomartani perlu menerapkan *governing* dalam pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo, serta dampak pemanfaatan sumber daya bersama terhadap kemakmuran warga setempat. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana peran pemerintah kalurahan dalam menyelenggarakan desa wisata, termasuk bagaimana Pokdarwis menerapkan model *Common Pool Resources* untuk mendukung kemakmuran masyarakat lokal di Dusun Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan karena mengangkat aspek peran pemerintah dalam pengembangan wisata desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perbuatan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo?
2. Bagaimana Dampak Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga?

C. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian penting untuk membatasi cakupan subjek yang diteliti. Peneliti dapat menghindari kelebihan data di lapangan dengan memiliki fokus yang jelas. Fokus penelitian juga membantu menyaring informasi yang berpotensi membingungkan, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Maka fokus penelitian ini meliputi:

1. Pelayanan Desa Wisata Umbul Sidomulyo
2. Sumber Dana Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo
3. Program Pemberdayaan Terhadap Kelompok Sadar Wisata
4. Perlindungan kepada pengunjung Desa Wisata Umbul Sidomulyo
5. Pengawasan dan Kontrol Desa Wisata Umbul Sidomulyo
6. Pengelolaan Desa wisata Umbul Sidomulyo yang dilakukan Kelompok Sadar Wisata dan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani terhadap kemakmuran warga

Dengan fokus ini, membantu penelitian saya akan terarah untuk memahami baik dari sisi pengelolaan Desa Wisata umbul sidomulyo oleh Pemerintah dan Pokdarwis maupun dampak sosial, ekonomi, kemakmuran terhadap warga lokal. Ini akan membantu Anda memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian pengelolaan wisata berbasis masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang Anda angkat, tujuan penelitian yang tepat untuk skripsi Anda dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan *Governing* yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Tirtomatani terhadap desa wisata Umbul Sidomulyo.
2. Untuk menjelaskan Pengelolaan Desa Wisata yang dilakukan Kelompok sadar wisata Umbul Sidomulyo bagi kemakmuran warga.

E. Manfaat Penelitian

Saya sebagai penulis berharap bahwa dengan adanya tulisan ini akan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun para pembaca. Sejumlah manfaat yang diharapkan saya sebagai penulis dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Toeritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *Governing* dalam konteks pengelolaan desa wisata berbasis sumber daya bersama. Dalam penelitian ini, *Governing* tidak hanya dipahami sebagai perbuatan pemerintah dalam mengatur dan mengurus suatu wilayah, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan keterlibatan aktor-aktor lokal dalam pengelolaan Desa Wisata. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya dalam tata kelola wisata berbasis masyarakat. Penelitian ini juga mengembangkan pemahaman tentang peran pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui intervensi kebijakan, regulasi, dan pemberdayaan kelompok lokal seperti *Pokdarwis*.

2. Manfaat Praktis

Berbagai pihak terkait mendapat manfaat dari penelitian ini. Penemuan penelitian dapat membantu pemerintah lokal membuat kebijakan pemanfaatan sumber daya dan desa wisata yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, sektor pariwisata dapat meningkatkan kemakmuran warga. Penelitian ini dapat membantu pengelola wisata Umbul Sidomulyo memahami lebih baik bagaimana aturan dan pengelolaan dapat dioptimalkan untuk mendukung

keberlanjutan wisata dan kemakmuran warga setempat. Selain itu, penelitian ini akan memberikan dasar untuk membangun sistem pengelolaan dan pembagian memberikan masukan kepada pemerintah lokal dan kelompok sadar wisata tentang prinsip-prinsip pengelolaan desa wisata yang mendatangkan kemakmuran bagi warga.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji pengelolaan wisata berbasis sumber daya bersama dengan pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam konteks pengelolaan desa wisata. Hasil penelitian ini juga dapat membuka ruang untuk penelitian lanjutan mengenai peran pemerintah dan Pokdarwis dalam pengelolaan sumber daya bersama. Mengenai hadirnya negara dan organisasi kelompok sadar wisata sebagai simbol hakikat tentang desa.

F. Literatur Review

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zaqiah Ramdani dan Tuti Karyani (2020) berjudul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Agrowisata dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*. mengeksplorasi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Agrowisata Kampung Flory di Sleman, Yogyakarta, serta dampaknya terhadap aspek sosial ekonomi penduduk setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kampung Flory cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan. Pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil, tingkat partisipasi masyarakat termasuk kategori sedang, sementara pada tahap perencanaan dan evaluasi, partisipasi tergolong sangat baik. Namun, optimalisasi sumber daya manusia masih diperlukan karena jumlah masyarakat yang terlibat masih terbatas. Keterlibatan masyarakat di Kampung Flory sangat penting untuk

meningkatkan kerja sama dan gotong royong, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola destinasi wisata. Selain itu, masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan Kampung Flory secara teratur mengikuti pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan komunitas. Dampak Kampung Flory terhadap ekonomi sangat signifikan. Agrowisata memberi masyarakat setempat peluang usaha dengan menjual barang wisata dan membuka usaha kecil di sekitar lokasi wisata. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata meningkat, terutama selama musim ramai wisatawan. Selain itu, Kampung Flory membantu masyarakat sekitar mencari pekerjaan baru, sehingga mengurangi pengangguran di wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa konsep wisata berbasis komunitas (CBT) digunakan untuk mengelola Kampung Flory secara efektif meningkatkan kesehatan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nunun Nurhajati (2020) berjudul *Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Mulyosari di Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, menekankan efek positif yang dihasilkan dari pembangunan Desa Wisata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini meneliti bagaimana pembangunan Desa Wisata dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di desa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan Desa Wisata memiliki efek positif yang signifikan, khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa banyak peluang bisnis baru dan lapangan kerja di sektor pariwisata telah muncul, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya hanya bergantung pada sektor pertanian untuk menghasilkan uang melalui aktivitas wisata. Perdagangan, penyediaan layanan pariwisata, dan usaha kecil yang berkembang di daerah wisata merupakan aktivitas ekonomi baru. Wisatawan juga membantu meningkatkan nilai properti Desa Mulyosari karena properti tersebut dapat menjadi aset investasi bagi warga setempat. Dari perspektif sosial budaya, penelitian ini menunjukkan

bahwa dengan membangun Desa Wisata , masyarakat semakin menyadari pentingnya melestarikan adat istiadat dan seni budaya setempat. Masyarakat semakin berpartisipasi dalam mengintegrasikan budaya mereka ke dalam kegiatan wisata, seperti pertunjukan seni dan upacara adat, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih baik dalam mengelola wisata dan berinteraksi dengan wisatawan setelah menerima berbagai pelatihan, seperti pelatihan manajemen dan keterampilan berbahasa Inggris. Membangun Desa Wisata juga menghadirkan tantangan sosial, seperti munculnya persaingan tidak sehat antarwarga yang dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan sosial dan memaksimalkan manfaat pengembangan wisata, pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) harus bekerja sama dengan lebih baik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nunun Nurhajati (2020) menunjukkan bahwa dengan membangun Desa Wisata Mulyosari, orang dapat memperoleh lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan mempertahankan budaya lokal, sehingga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan yang lebih baik diperlukan untuk mengurangi efek negatif seperti persaingan sosial yang tidak sehat dan ketimpangan dalam pembagian keuntungan ekonomi.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Aprilyana Selin Marsela dan Atika Wijaya (2020) berjudul "Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang" mempelajari bagaimana pengembangan objek wisata Goa Kreo berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Dusun Talun Kacang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan destinasi wisata Goa Kreo telah membawa perubahan besar, baik secara fisik maupun non-fisik. Perubahan ini telah berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ekonomi, banyak orang yang meninggalkan pekerjaan pertanian untuk bekerja di sektor pariwisata. Mereka yang dulunya bekerja sebagai petani sekarang bekerja sebagai pedagang, penyedia layanan wisata, atau pengelola homestay. Dibandingkan sebelum wisata, pendapatan masyarakat meningkat sebagai akibat dari pergeseran ini. Ada peluang bisnis baru di sekitar Goa Kreo yang

memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui bisnis pariwisata. Dalam hal sosial budaya, objek wisata ini mendorong masyarakat untuk berinteraksi lebih sering dengan wisatawan dan membuka wawasan mereka. Namun, dampak negatif yang terlihat termasuk perubahan perilaku dan gaya hidup yang lebih materialistis dan berfokus pada keuntungan finansial. Selain itu, orang-orang lokal lebih sering berbicara dalam bahasa Indonesia daripada bahasa Jawa saat berbicara dengan wisatawan. Nilai-nilai konvensional seperti toleransi dan gotong royong masih digunakan.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Maya Sajidah Salsabila dan Agus Machfud Fauzi (2021) berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)" membahas partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Menang di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Menang dengan ide-ide, tenaga kerja, dan kreativitas mereka membantu mengembangkan Desa Wisata. Desa ini memiliki dua potensi utama: produk unggulan buah belimbing dan situs bersejarah Petilasan Sri Aji Jaya Baya, yang menarik wisatawan religius dan sejarah. Kelompok-kelompok seperti POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), PKK, dan Karang Taruna secara aktif mengelola dan mempromosikan potensi desa, menunjukkan partisipasi masyarakat yang kuat. Olahan buah belimbing seperti dodol dan sari buah adalah produk khas desa yang dibuat oleh masyarakat. Pengembangan Desa Wisata ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, karena masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian beralih ke pariwisata sebagai sumber pendapatan tambahan. Studi ini menemukan bahwa pembangunan Desa Wisata meningkatkan pendapatan warga. Misalnya, beberapa warga yang dulunya bekerja sebagai buruh tani sekarang mendapatkan penghasilan tambahan setiap hari dengan bekerja sebagai pedagang, penjaga parkir, atau penjual produk olahan belimbing. Desa Wisata ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan menciptakan peluang usaha baru. Di bidang sosial, interaksi yang terjadi antara masyarakat dan pengunjung membantu memperluas pengetahuan dan cara berpikir warga. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat Desa Menang dalam pembangunan Desa Wisata berdampak positif pada peningkatan ekonomi dan keterlibatan sosial.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Firman Syah dalam jurnal berjudul "Pariwisata Sebagai Faktor Pendukung Kesejahteraan Masyarakat" (2020) berfokus pada bagaimana pariwisata dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Hasil penelitian Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama pemerintah-masyarakat dalam pengembangan pariwisata mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata di desa-desa di Indonesia dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat karena luasnya wilayah pedesaan negara tersebut. Wisata petualangan, agraria, bahari, kuliner, sejarah, budaya, dan kreatif adalah beberapa model pariwisata yang dapat dikembangkan, semuanya disesuaikan dengan potensi alam dan budaya lokal. Dilihat dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata, masyarakat lokal dapat melihat dampak dari pariwisata terhadap ekonomi mereka. Misalnya, orang-orang yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian dapat beralih atau meningkatkan pendapatannya dengan menjalankan layanan pariwisata seperti homestay, menjadi pemandu wisata, atau menjual barang-barang lokal. Kondisi ini juga membantu meningkatkan pendapatan per kapita di daerah tersebut dan mengurangi pengangguran. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan. Manfaat ekonomi dan sosial lebih sering dirasakan oleh masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan promosi wisata. Pengembangan pariwisata di desa sangat bergantung pada dukungan pemerintah, yang mencakup pelatihan, fasilitas, dan penguatan kelembagaan lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Namun, untuk memastikan dampak positif pariwisata dapat bertahan dalam jangka panjang, penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Keenam, Penelitian dalam jurnal berjudul "Model Strategi Pengembangan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Situ Gunung Sukabumi" (2022), ditulis oleh

Fakhry Hafiyyan Kurniawan dan Mahbub Afini Maulana, berfokus pada upaya untuk memajukan Desa Wisata dengan menggunakan pendekatan Soft System Methodology (SSM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah model konseptual strategi untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) dan institusi lokal, yang diharapkan akan menghasilkan hasil yang positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pengelolaan Desa Wisata ini dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena partisipasi aktif masyarakat, sumber daya alam (SDA) seperti Curug Sawer, Danau Situ Gunung, dan atraksi alam lainnya dikelola dengan baik. Penduduk setempat secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka sebagai pemandu wisata. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pembentukan kelompok lokal seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Wanita Tani (KWT), yang bertanggung jawab atas pengelolaan Desa Wisata. Sebagai contoh, KWT Pujasera Binangkit telah menghasilkan berbagai produk olahan makanan, seperti abon pepaya dan stik ubi ungu, yang telah meningkatkan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga di desa. Penelitian ini menemukan beberapa masalah, termasuk kualitas sumber daya manusia yang kurang, keterbatasan infrastruktur, dan promosi wisata yang kurang. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, peneliti menyarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dan penggunaan media komunikasi modern yang lebih efisien. Untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan wisata, pemerintah desa dan lembaga lokal juga harus membantu.

Ketujuh, Penelitian yang ditulis oleh I Gusti Ngurah Saka Ariantika, Moh. Jumail, dan Murianto (2022), "Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat" Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: partisipasi melalui gagasan, tenaga, dan keahlian. Dalam pertemuan desa, masyarakat secara aktif memberikan ide-ide, terutama melalui Pokdarwis. Pokdarwis ini berfungsi sebagai forum utama bagi warga untuk berpartisipasi dalam manajemen objek wisata, seperti Pantai Kepo,

yang sekarang menjadi pusat kegiatan pariwisata desa. Dengan dukungan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan Pantai Kepo berada di bawah kendali masyarakat. Selain itu, tenaga juga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan dan memperbaiki area wisata. Masyarakat melakukan kegiatan gotong royong ini secara teratur, dan mereka berhasil mengubah pantai yang sebelumnya tidak terawat menjadi tempat wisata yang menarik. Pengembangan pariwisata ini berdampak besar pada masyarakat lokal, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi. Sekarang masyarakat dapat membuka bisnis di sekitar tempat wisata, seperti menjual makanan, minuman, dan produk lokal lainnya. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak merata, dan promosi dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi masalah.

Kedelapan, Penelitian yang ditulis oleh Yanis Putri Mahanani dan Haniek Listyorini (2021) berjudul "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Guna Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Lokal di Desa Wisata Cempaka, Bumijawa, Kabupaten Tegal" membahas model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat lokal di Desa Wisata Cempaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Cempaka melibatkan empat elemen penting: partisipasi masyarakat, pemberdayaan, keuntungan masyarakat, dan konservasi lingkungan. Masyarakat terlibat dalam pembangunan pariwisata dalam berbagai hal, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan Desa Wisata. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan destinasi wisata melalui kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pasar Slumpring, misalnya, memberi warga kesempatan untuk menjual makanan tradisional dan meningkatkan pendapatan mereka secara langsung. Masyarakat Desa Cempaka mendapat manfaat besar dari pertumbuhan pariwisata. Berbagai pekerjaan baru muncul sebagai hasil dari pariwisata di wilayah ini, seperti penjaga objek wisata, pemandu wisata, dan penyewaan fasilitas wisata. Ini meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, terutama bagi sektor pariwisata. Pasar Slumpring, daya tarik utama desa, membantu meningkatkan ekonomi desa dengan memberikan peluang bagi

penduduk lokal untuk berjualan dan berinteraksi dengan para wisatawan serta menciptakan suasana tradisional yang menarik perhatian pengunjung.

Kesembilan, Sebuah artikel berjudul "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan", yang ditulis oleh Alfi Husni dan Safaat dan diterbitkan dalam Jurnal Socius Vol. 6 No. 1, 2019, dibahas dalam artikel review ini. Meskipun penelitian ini menekankan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan Desa Wisata Teluk Bakau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih sangat rendah. Hasil utama dari penelitian ini adalah dominasi pemerintah dalam pembangunan Desa Wisata, di mana masyarakat lokal cenderung di pinggirkan. Pemerintah memiliki otoritas lebih besar dalam pengambilan keputusan, sementara masyarakat lokal lebih sering bertindak sebagai penerima kebijakan daripada pelaku utama pembangunan. Pada tahap perencanaan, tidak banyak orang di masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengidentifikasi masalah. Keterlibatan masyarakat lebih formal dan pemerintah sering mengabaikan saran yang diberikan. Selama tahap implementasi, masyarakat lokal hanya terlibat dalam bisnis kecil seperti warung makan, sedangkan investor dari luar menguasai bisnis pariwisata yang lebih besar, seperti resort dan vila. Akibatnya, masyarakat lokal kesulitan bersaing dengan investor yang memiliki modal besar, sehingga pihak luar lebih banyak mengambil keuntungan dari pariwisata. Pada tahap pengawasan, masyarakat lokal tidak terlalu terlibat. Ini sering dianggap sebagai pengawasan berlebihan oleh pemerintah, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan. Ini menambah jarak antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pariwisata di Desa Teluk Bakau belum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat lokal.

Kesepuluh, Penelitian berjudul "Model dan Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Pilanggede, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro", yang dilakukan oleh Moch. Samsul Anwar, Agung Wibowo, dan Drajat Tri Kartono pada tahun 2023, Hasil penelitian

menemukan bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk pertumbuhan Desa Wisata . Selain itu, penelitian ini menekankan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal untuk memberdayakan masyarakat. Pengembangan Desa Wisata memerlukan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan, menurut model pengembangan yang diusulkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap fase pengembangan, seperti perencanaan, pengelolaan, dan promosi, memungkinkan sektor pariwisata menguntungkan masyarakat secara langsung. Selain itu, model ini menawarkan pedoman praktis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri-ciri masing-masing Desa Wisata . Studi ini menemukan bahwa pengembangan Desa Wisata sangat bergantung pada partisipasi masyarakat lokal yang aktif. Masyarakat lokal berperan sebagai pengelola utama sumber daya wisata dan penerima manfaat.

Berdasarkan ulasan terhadap berbagai jurnal mengenai pengembangan Desa Wisata dan dampaknya terhadap kemakmuran warga, Saya dapat mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dan pemerintah merupakan elemen kunci dalam kesuksesan usaha wisata. Setiap penelitian menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam berbagai tahapan pengembangan, seperti perencanaan, implementasi, dan pengelolaan, yang tidak hanya meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan ekonomi lokal. Namun, di beberapa daerah, partisipasi ini masih belum optimal, dan seringkali terdapat dominasi pemerintah atau pihak luar yang menghambat manfaat langsung bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, gagasan utama yang bisa dikembangkan dari tinjauan ini adalah pentingnya kolaborasi yang lebih seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, di mana masyarakat harus diberdayakan sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai penerima kebijakan. Pengelolaan sumber daya lokal secara partisipatif institusi lokal, dengan dukungan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, dapat memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta pelestarian lingkungan. Selain itu, untuk mengatasi tantangan sosial seperti persaingan tidak sehat dan konflik antarwarga, diperlukan mekanisme yang lebih inklusif dalam pembagian manfaat ekonomi dan keputusan pengelolaan pariwisata. Dengan pendekatan

yang lebih komprehensif dan partisipatif, pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk mengangkat kemakmuran warga desa secara berkelanjutan.

Secara umum, sepuluh penelitian di atas mirip dengan penelitian ini, terutama mengenai subjek yang dibahas. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengungkap pengembangan desa wisata dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat desa atau kalurahan. Namun, ada perbedaan signifikan antara studi ini dan sepuluh studi sebelumnya. Studi ini secara khusus mengkaji dan menjelaskan pengaturan dan pengurusan desa wisata Umbul Sidomulyo untuk mengembangkan desa wisata umbul Sidomulyo. Hal lain yang membedakan mereka adalah teori yang digunakan. Teori *Governing* yang dilakukan Pemerintah kalurahan digunakan untuk melihat desa wisata berbasis pemanfaatan sumber daya bersama bisa memberikan dampak terhadap Kemakmuran warga.

G. Kerangka Konseptual

Diperlukan kerangka konseptual yang lebih memadai untuk membahas masalah di atas secara menyeluruh. Terlebih dahulu, kerangka konseptual ini akan membahas konsep-konsep dasar tentang Pemerintah, Pemerintah desa, dan *Governing*, serta bagaimana penerapan dan pemanfaatan ini berdampak pada kemakmuran warga sekitar.

1. Pemerintah

Secara umum, Pemerintah merujuk pada lembaga atau badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan suatu wilayah atau negara. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi-fungsi kenegaraan, termasuk pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

Menurut Rosenbloom (2004), pemerintah adalah “seperangkat institusi dan aktor yang memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan yang mengikat bagi masyarakat dalam wilayah tertentu.” Pemerintah

berfungsi untuk menjaga ketertiban, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencapai tujuan bersama dalam suatu negara.

a) Komponen Pemerintah

Pemerintah terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung, meliputi:

- 1) Legislatif: Membuat undang-undang atau kebijakan.

Contoh: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia.

- 2) Eksekutif: Melaksanakan undang-undang dan kebijakan.

Contoh: Presiden, kementerian, hingga pemerintah daerah.

- 3) Yudikatif: Menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa hukum.

Contoh: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya.

b) Tingkatan Pemerintah

Pemerintah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pemerintah Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan:

- 1) Pemerintah Pusat

Terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan kementerian-kementerian. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan nasional.

- 2) Pemerintah Daerah

Terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Pemerintah daerah bertugas melaksanakan otonomi daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

- 3) Pemerintah Desa

Pemerintah desa atau kelurahan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lokal dengan dukungan dana desa sesuai UU No. 6 Tahun 2014.

c) Fungsi Pemerintah

Pemerintah memiliki fungsi yang beragam untuk memastikan tata kelola yang efektif dan pembangunan yang berkelanjutan. Fungsi-fungsi ini dapat dirangkum menjadi lima bidang utama:

1) Regulasi

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Misalnya, kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

2) Administrasi:

Pemerintah memastikan pelaksanaan kebijakan secara terstruktur melalui lembaga-lembaga administratif.

3) Distribusi

Pemerintah mendistribusikan sumber daya, seperti dana dan bantuan sosial, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Penegakan Hukum

Menjamin hukum ditegakkan secara adil dan masyarakat terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal.

5) Pelayanan Publik

Pemerintah memberikan layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

2. Pemerintah Desa

Di Indonesia, umumnya setiap desa memiliki pemerintahan desa. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintahan desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Definisi Pemerintah Desa

Berdasarkan pemahaman dan konsep tentang pemerintahan desa yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pemerintahan desa:

1. Pemerintahan desa berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan,
2. Pemerintahan desa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, dan
3. Pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menerima tugas atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menangani urusan pemerintahan tertentu. Definisi mengenai Desa ini diperjelas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan diatas menunjukkan definisi bahwa pemerintah sampai saat ini memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengatur kehidupan mereka sendiri. Selain memiliki hak untuk mengatur seluruh kehidupan mereka sendiri, desa juga bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pengaturan desa di antaranya;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan bersama.
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi ketimpangan dalam pembangunan nasional.
3. Memperkuat posisi masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, desa perlu menerapkan berbagai strategi yang efektif. Strategi ini menjadi hal yang krusial untuk memastikan bahwa alokasi, potensi, dan sumber daya yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan. Pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara maksimal.

b) Tugas dan fungsi

Kepala desa bertanggung jawab memimpin pemerintahan desa sekaligus mengarahkan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut untuk melaksanakannya :

1. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti penetapan aturan, tata praja, pembinaan dalam hal kepengurusan pertanahan, ketentaraman dan ketertiban, serta melakukan perlindungan, administrasi serta penataan dalam pengelolaan wilayah pedesaan;
2. Melaksanakan pembangunan, pembangunan harus dilakukan untuk melengkapi prasarana pedesaan dan pembangunan kesehatan serta pendidikan di pedesaan;
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pada pelaksanaan hak, partisipasi masyarakat, sosial dan budaya, keagamaan serta ketenagakerjaan perlu dilakukan;

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti melakukan sosialisasi memberikan motivasi pada bidang-bidang tertentu; dan
5. Mejaga hubungan yang baik antar lembaga.

3. Governing

Governing, diartikan sebagai upaya untuk mengelola dan mengatur, harus mencakup proses, fungsi, serta hasil. Hal ini sejalan dengan makna kata kerja "memerintah." Namun, istilah "memerintah" jarang digunakan dalam konteks pemerintahan dan lebih tepat diungkapkan sebagai "menyelenggarakan pemerintahan." *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*. Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan kohersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat (Sutoro Eko, 2021: 12-13).

Dalam buku *Ruling But Not Governing* (2007), Stephen Cook menjelaskan perbedaan antara dua konsep, yaitu *ruling* (menguasai) dan *governing* (memerintah). Dalam buku ini mengacu pada sejarah politik dan militer Mesir, di mana meskipun militer memiliki kontrol yang besar atas kehidupan masyarakat, mereka tidak menjalankan fungsi pemerintahan seperti mengatur atau mengurus urusan negara. Dalam konteks ini, meskipun militer memiliki kekuasaan, mereka hanya *ruling* (menguasai), bukan *governing* (memerintah).

Ruling adalah bentuk kekuasaan yang bisa dijalankan oleh siapa saja, baik itu militer maupun kelompok non-pemerintah, dan biasanya melibatkan dominasi. Sementara itu, *governing* hanya dapat dilakukan pemerintah dan aktor non pemerintah yang memiliki kekuasaan yang sah untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang mencakup pengambilan keputusan untuk mengelola dan mengatur masyarakat.

Pembentukan hukum dan kebijakan adalah aspek penting dalam governing. Dengan kata lain, diskursus mengenai governing selalu berkaitan erat dengan kebijakan. Kebijakan sendiri merupakan tindakan utama yang dilakukan oleh pemerintah. Secara singkat, kebijakan adalah jantung dan perbuatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur serta memerintah (Sutoro Eko, 2021: 14).

Konsep *governing* berasal dari tradisi Belanda yang mencakup dua aspek penting, yaitu mengatur dan mengurus. Dalam hal ini, *mengatur* berarti membuat keputusan-keputusan penting, terutama dalam pembuatan hukum atau peraturan (*law making*). Sementara itu, *mengurus* berfokus pada kegiatan manajerial dan administratif, seperti pengelolaan berbagai sektor. Jadi, *mengatur* dan *mengurus* lebih berkaitan dengan tindakan hukum dan administratif, yang menekankan pada pengelolaan suatu negara atau pengelolaan yang dilakukan aktor lainnya, namun sedikit mengabaikan peran politik dalam arti pengambilan keputusan politik yang lebih luas.

Dalam tradisi ini, *governing* menjalankan beberapa fungsi utama, antara lain:

- a) Mengarah (*steering*): Fungsi ini berhubungan dengan memberikan panduan atau arahan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis.
- b) Menata (*ordering*): Menyusun atau merancang struktur dan kebijakan pemerintahan agar lebih teratur dan efisien.
- c) Memerintah (*governing*): Tindakan langsung dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan untuk mengelola dan mengatur masyarakat sesuai dengan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- d) Mengurus (*ruling*): Berfokus pada pengelolaan dan pengaturan kehidupan sosial dan administratif, yang meskipun dilakukan oleh pemerintah, juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki kekuasaan.

Governing bukan hanya tentang pengelolaan atau pemerintahan, itu juga merupakan arena kontestasi di mana berbagai aktor yang memiliki kekuatan,

kedaulatan, dan legitimasi demokratis. Karena itu, sangat penting bagi aktor-aktor yang terlibat untuk menjalankan perannya secara independen, tanpa terpengaruh oleh elit politik atau pihak lain, sehingga proses pengaturan dan pengelolaan dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal mencakup tiga fungsi utama yang dijalankan oleh pemerintah:

- a) Regulasi (public regulation),
- b) Pelayanan publik (public goods), dan
- c) Pemberdayaan masyarakat (empowerment).

Regulasi berkaitan dengan kegiatan yang mengatur, seperti menetapkan peraturan yang mengharuskan pelaksanaan perintah tertentu dan melarang tindakan yang tidak sesuai, terkait dengan pemanfaatan sumber daya publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, dan keuangan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat berfokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya bersama tersebut, sekaligus mendukung pengembangan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah peran pemerintah desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik untuk kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 67 menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 90, yang mengatur pengelolaan aset desa, mencakup kekayaan alam seperti tanah, mata air, dan budaya. Aset-aset ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, Pasal 26 Ayat 4 menggarisbawahi kewajiban pemerintah desa untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Pasal 78 menambahkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Pembangunan ini dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan pemerintahan terendah sekaligus kesatuan hukum masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai sosial budaya masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan kewenangan yang besar untuk melindungi, mengembangkan, melestarikan budaya, serta memanfaatkan potensi dan sumber daya bersama yang dimiliki oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan perbuatan yang lebih konkret dari pemerintah desa untuk mengelola potensi yang ada demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan sebuah tindakan untuk mengubah agar menjadi lebih baik dengan memiliki nilai tinggi daripada semula. George R. Terry dalam buku *Principles of Management* (Sukarna, 2011:3) juga menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membentuk sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik Berdasarkan pengertian di atas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan Manajemen yaitu merupakan sebuah ilmu, dimana yang mengatur tentang proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil dan harapan yang sesuai. Fungsi pengelolaan Menurut George Terry (1958) dalam bukunya *principles of management* terdapat empat fungsi dasar manajemen:

a) Fungsi Perencanaan

Menurut G.R Terry, fungsi manajemen Planning adalah “Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to accieve desired result”. Adapun artinya “Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.

b) Fungsi Pengorganisasian

Menurut George R. Terry bahwa fungsi manajemen dalam hal ini organizing berarti penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam- macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang- orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor- faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.”

c) Fungsi Pelaksanaan/Penggerakan

Menurut George R. Terry bahwa arti Actuating dalam fungsi manajemen adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

d) Fungsi Pengawasan

Menurut George R. Terry bahwa fungsi controlling dalam manajemen adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan- perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras

dengan standard(ukuran)” Berdasarkan penelti di atas, saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Manajemen adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai dengan yang ditentukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang disebut eksplanatif kualitatif. Menurut Sarwono (2006:193), penelitian kualitatif adalah suatu proses yang menekankan pemahaman, kompleksitas, dan interaksi antara manusia. Tujuan penelitian eksplanatif adalah untuk memberikan penjelasan terkait alasan suatu peristiwa atau fenomena terjadi atau untuk menjawab pertanyaan "mengapa" sesuatu terjadi.

Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai aspek sejarah, perilaku, aktivitas sosial, dan kehidupan masyarakat. Metode ini membantu peneliti menemukan dan memahami konteks suatu fenomena. Peneliti harus memahami dan memahami proses ini dengan baik. Penelitian kualitatif biasanya bersifat kontekstual dan biasanya menganalisis fenomena secara induktif, memulai dengan hal-hal tertentu untuk mencapai pemahaman yang lebih umum tentang artinya (Tracy, 2013). Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatif. Pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" digunakan dalam studi eksplanatif karena tujuan mereka adalah untuk memberikan penjelasan informasi deskriptif (Gray dalam Boru, 2018). Dengan cara ini, kita juga dapat menemukan alasan mengapa suatu fenomena terjadi. Penelitian eksplanatif mencakup pencarian alasan dan penyebab serta penyediaan bukti yang mendukung atau menyangkal prediksi atau penjelasan. Menurut Boru (2018), ini dilakukan untuk menemukan hubungan antara berbagai aspek fenomena yang diteliti.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di desa wisata Umbul Sidomulyo RT 08, Dusun Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di tempat penelitian tersebut diharapkan saya sebagai penulis dapat menggali informasi terkait proses Governing yang dilakukan pemerintah Kalurahan Tirtomartani digunakan untuk melihat desa wisata berbasis sumber daya bersama. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak Desember 2024 - Januari 2025.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah pengaturan dan pengurusan mengenai Desa Wisata Umbul Sidomulyo, *Governing* Oleh Pemerintah kalurahan dan pengelolaan Pokdarwis terhadap Desa Wisata Umbul Sidomulyo. kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, pengelola Desa Wisata Umbul Sidomulyo, dan Dusun Brintikan yang ada di Kalurahan Tirtomartani.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian atau narasumber juga disebut informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat untuk melengkapi data. Dalam hal ini, subjek penelitian mencakup semua hal yang relevan, termasuk orang atau kelompok yang memberikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Menurut Burhan Bungin (2017:73), ada tiga metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan informan untuk penelitian. Teknik purposive, prosedur kuota, dan prosedur snowball adalah tiga metode yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan prosedur purposive, yang memilih informan berdasarkan kriteria tertentu. Dengan cara ini, peneliti menargetkan peserta yang dianggap relevan dan mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dari sumber yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari:

Tabel 1. 1 Profil Subjek Penelitian

| No | Kategori Informasi | Jumlah Orang | Keterangan |
|-----------|---------------------------|---------------------|---|
| 1 | Pemodal (Investor) | 1 Orang | Individu yang memberikan modal investasi di Wisata Umbul Sidomulyo. |
| 2 | Pengelola Wisata | 3 Orang | Pengelola Keuangan, Sekretaris, Penjaga Locket |
| 3 | Pengunjung Wisata | 2 Orang | Pengunjung yang berperan sebagai konsumen dan dapat memberikan perspektif terhadap kualitas wisata. |
| 4 | Masyarakat Lokal | 5 Orang | Warga sekitar yang terdampak oleh keberadaan usaha wisata |
| 5 | Pemerintah Lokal | 2 Orang | Perwakilan pemerintah lokal yang memiliki peran dalam regulasi dan dukungan pengembangan wisata |

I. Metode Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dengan informan yang relevan, yang memberikan informasi tentang pengalaman atau perspektif pribadi mereka tentang subjek penelitian. Sementara itu, data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti arsip, perpustakaan, atau laporan yang diakses melalui pihak kedua. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa cara data dikumpulkan.

a) Observasi

Observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data melalui pengamatan yang terstruktur terhadap elemen-elemen yang tampak dalam

fenomena pada objek penelitian. Tujuan dari elemen-elemen ini, yang berupa data atau informasi yang harus diperhatikan dan dicatat langsung di lapangan, adalah untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang sedang diteliti (Widoyo, 2012:46). Memanfaatkan semua indra manusia (seperti penciuman, perabaan, pendengaran, penglihatan, dan pengecap) untuk fokus pada objek tertentu disebut observasi, atau juga disebut pengamatan. Oleh karena itu, ada banyak cara untuk melakukan observasi, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap keadaan dan situasi secara menyeluruh. Peneliti menggunakan metode observasi untuk memahami kondisi awal lokasi penelitian. Data yang mereka peroleh dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan kontekstual tentang latar permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah jenis pengalihan informasi yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari narasumber (Arikunto, 1993:126). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang sudut pandang atau pandangan individu terhadap masalah, tema, atau topik tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang perasaan, pemikiran, dan perspektif informan, sehingga data yang dikumpulkan mencakup aspek-aspek yang mungkin sulit disampaikan dengan pendekatan lain. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh pemahaman lebih luas serta memperkuat hasil penelitian.

c) Dokumentasi

Sugiyono (2017:476) mendefinisikan dokumentasi sebagai proses pengumpulan data dan informasi dalam berbagai bentuk, seperti laporan, buku, arsip, dokumen, catatan angka, gambar, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Fokus penelitian ini adalah dokumentasi yang tercatat dan tersimpan tentang manajemen bisnis wisata Umbul Sidomulyo di

Kalurahan Tirtomartani. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber informasi penting yang memberikan gambaran mendalam tentang sejarah, struktur, dan dinamika operasional wisata. Ini dapat membantu pengkajian mendalam tentang bagaimana wisata memengaruhi kemakmuran warga setempat.

J. Teknik Analisis Data



(Miles dan Huberman (dalam Ilyas, 2016))

a) Reduksi Data

Langkah penting dalam analisis data adalah reduksi data, yang mencakup penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data lapangan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan atau tidak diperlukan dan mengorganisasi data secara lebih efisien. Proses ini memungkinkan peneliti untuk berkonsentrasi pada komponen penting, yang memudahkan interpretasi dan pengambilan kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan hasil yang telah disusun dalam bentuk naratif, bagan, dan hubungan antar kategori, yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan. Selama proses pengujian data, pola yang konsisten akan terbentuk jika ada perkembangan dan rumusan yang didukung oleh data yang relevan. Data kemudian disajikan sesuai dengan temuan penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari proses penelitian, yang dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Di sini,

peneliti menguraikan hasil utama dari penelitian dan membuat kesimpulan yang menjawab pertanyaan awal. Kesimpulan ini menunjukkan hasil analisis data dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

BAB II

DESKRIPSI UMUM KALURAHAN TIRTOMARTANI

A. Keadaan Geografis

1. Sejarah Umum Kalurahan Tirtomartani

Pada tahun 1947, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memperbarui birokrasi pemerintahan di Yogyakarta dengan menambahkan tingkatan pemerintahan propinsi, kabupaten, kapanewon, dan desa. Dalam konteks birokrasi modern, pemerintah diharapkan dapat membiayai operasinya sendiri. Desa diberi tanah oleh Sri Sultan HB IX sebagai sumber pendapatan. Tanah tersebut digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk membayar pamong kalurahan melalui tanah pelungguh, untuk pensiunan pamong melalui tanah pengarem-arem, dan untuk membiayai operasional pemerintahan kalurahan melalui tanah kas desa. Di daerah Tirtomartani, terdapat empat kalurahan lama, yaitu Kalurahan Glondong, Kalurahan Kalibening, Kalurahan Geneng, dan Kalurahan Kalimati, digabungkan menjadi satu desa, yang disebut *blengketan*. Pada hari Jumat, 18 April 1947, Dewan Kalurahan Tirtomartani mengadakan sidang pertama kali dan di hari itu ditetapkan sebagai Hari Jadi Kalurahan Tirtomartani. Keputusan mengenai penggabungan kalurahan lama kemudian diperkuat dengan adanya Maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1948, yang dikeluarkan pada 19 April 1948.

Nama "Tirtomartani" berasal dari "Tirta" yang memiliki makna air dan "Martani" bermakna tempat, karena wilayah ini didominasi sumber mata air dan kebanyakan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, dengan sumber air yang melimpah dan kondisi tanah yang subur, sehingga hasil panen selalu berlimpah. Bapak R. Tirtoatmojo ditunjuk sebagai lurah pertama yang memimpin Kalurahan Tirtomartani, dan balai desa yang digunakan sebagai pusat pemerintahan kala itu terletak di daerah Glondong. Nama ini mencerminkan harapan agar kelurahan ini terus makmur dan mampu memanfaatkan kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Daftar pemimpin yang telah memimpin Desa atau Kalurahan Tirtomartani hingga saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Lurah yang pernah memimpin Tirtomartani

| No | NAMA | TAHUN | KETERANGAN |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Tirtoatmojo | 1948-1963 | Lurah Pertama |
| 2 | Hardjosucipto | 1963-1967 | Lurah Kedua |
| 3 | Mangkuharjono | 1967-1986 | Lurah Ketiga |
| 4 | S. Purwodiharjo | 1986-1994 | Pj. Kepala Desa |
| 5 | Sriyanta | 1994-2013 | Lurah Desa |
| 6 | Danang Kristiawan, ST | 2013-2019 | Kepala Desa |
| 7 | Subiyantara, S.Pd | 2019-2020 | Pj. Kepala Desa |
| 8 | H. Indra Gunawan, SH | 2021- Sekarang | Lurah |

Sumberdata: Data Profil Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

Tabel 2.1 Berbagai lurah dan kepala desa yang pernah memimpin Tirtomartani masing-masing telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan desa ini. Setiap pemimpin membawa visi, tujuan, dan pendekatan yang berbeda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan perekonomian desa, memastikan keberlanjutan program pembangunan, dan memperkuat solidaritas serta persatuan di kalangan warga. Dengan dedikasi mereka, Desa Tirtomartani terus mengalami kemajuan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

2. Kondisi Geografis

Kalurahan Tirtomartani terletak di wilayah Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam aspek sosial, budaya, serta ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Dengan total luas mencapai 753,1365 hektar, Tirtomartani terbagi menjadi 17 Padukuhan, 39 RW, dan 135 RT, yang menggambarkan keragaman dan kompleksitas dalam struktur sosial dan administratifnya.

3. Batas-batas wilayah Kalurahan Tirtomartani adalah sebagai berikut:

- Di sebelah utara, Kalurahan Tirtomartani berbatasan dengan Kalurahan Selomartani yang terletak di wilayah Kapanewon Kalasan.
- Di sebelah selatan, batas wilayahnya berbatasan dengan Kalurahan Madurejo yang berada di Kapanewon Prambanan dan Kalurahan Kalitirto yang masuk dalam Kapanewon Berbah.
- Di sebelah barat, Kalurahan Tirtomartani berbatasan dengan Kalurahan Purwomartani yang juga berada di Kapanewon Kalasan.
- Di sebelah timur, berbatasan dengan Kalurahan Tamanmartani di Kapanewon Kalasan serta Kalurahan Bokoharjo di Kapanewon Prambanan.

Data ini menunjukkan bahwa pusat pemerintahan Kalurahan Tirtomartani terletak di Padukuhan Jetis, sekitar 19 kilometer dari ibu kota Kabupaten Sleman, yang menunjukkan bahwa Kalurahan Tirtomartani memiliki akses yang cukup dekat dengan pusat administrasi pemerintahan Kabupaten Sleman. Ini memungkinkan pemerintahan kalurahan untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan pihak yang lebih tinggi. Secara geografis, Kalurahan Tirtomartani berada di daerah dataran rendah dengan iklim tropis, yang menyebabkan cuaca di wilayah ini cenderung panas sepanjang tahun. Iklim ini memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat serta pola pertanian yang ada di daerah tersebut. Selain itu, Kalurahan Tirtomartani juga dilalui oleh beberapa sungai yang cukup penting, yakni Sungai Tepus, Sungai Wareng, dan Sungai Opak. Keberadaan sungai-sungai ini tidak hanya menjadi sumber air bagi

pertanian dan kehidupan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung sektor lain, seperti pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Pembagian wilayah Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Tirtomartani

Kalurahan Tirtomartani terdiri dari 17 padukuhan yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, dalam struktur administrasinya, wilayah ini terdiri dari 39 Rukun Warga (RW) dan 136 Rukun Tetangga (RT). Keterangan berikut menunjukkan rincian wilayah tiap padukuhan dan dukuh di Kalurahan Tirtomartani:

Tabel 2. 2 Padukuhan dan Dukuh Kalurahan Tirtomartani

| NO | Padukuhan | Dukuh | Rukun Warga | Rukun Tetangga |
|----|---------------|--------------------------|-------------|----------------|
| 1 | Glondong | Choirul Sholeh | 2 | 7 |
| 2 | Krajan | H.Drs. Arifin Nur Hamzah | 3 | 6 |
| 3 | KarangKalasan | Tukimin | 2 | 8 |
| 4 | Kringinan | Suparna Hadi | 3 | 6 |
| 5 | Jarakan | Muji Semi | 2 | 7 |
| 6 | Sembur | Dwi Aris Anggoro | 3 | 9 |
| 7 | Brintikan | Rohasis Suprihantoro | 2 | 8 |
| 8 | Kalibening | Sumaryanto | 2 | 7 |
| 9 | Dhuri | Riyanto Suhardono | 2 | 9 |
| 10 | Bendan | Sigit Wahyudi | 3 | 10 |
| 11 | Ngajeg | Sugeng Mustofa | 2 | 9 |
| 12 | Karangnongko | Pujianto, S.Pd | 2 | 7 |
| 13 | Kedulan | Hari Susanto | 2 | 8 |
| 14 | Pundung | Siswanto, A.Md | 2 | 6 |
| 15 | Kalimati | Subandi | 2 | 6 |
| 16 | Jetis | Anton Rohmadi, S.Pd | 2 | 15 |
| 17 | Tegalsari | Joko Wuryanto | 3 | 8 |

Sumberdata: RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

B. Keadaan Demografi

1. Jumlah penduduk

Data populasi Kalurahan Tirtomartani dari Sistem Informasi Database Administrasi Kependudukan (SIDAMPAK) mencapai 20.142 orang pada Maret 2021, dengan 9.994 laki-laki dan 10.148 perempuan. Berikut rincian lengkap dari data kependudukan tersebut :

Tabel 2. 3 Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomartani Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa |
|----|---------------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 9.994 |
| 2 | Perempuan | 10.148 |
| | Total | 20.142 |

Sumber: RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

Data pada tabel 2.3 dapat dilihat bahwa Jenis kelamin ditunjukkan dalam data populasi Kalurahan Tirtomartani, Jumlah laki-laki adalah 9.994 orang, atau sekitar 49,61% dari populasi, sedangkan jumlah perempuan adalah 10.148 orang, atau sekitar 50,38%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih besar dibandingkan dengan laki-laki.

2. Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomartani berdasarkan umur atau usia

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Kalurahan Tirtomatani Berdasarkan umur/usia

| No | Kategori umur | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah |
|----|---------------|------------------|------------------|--------|
| 1 | 0-6 | 975 | 1036 | 2.011 |
| 2 | 7-12 | 816 | 821 | 1.637 |
| 3 | 13-18 | 849 | 848 | 1.697 |
| 4 | 19-24 | 948 | 887 | 1.835 |
| 5 | 25-55 | 4.443 | 4.555 | 8.998 |
| 6 | 56-79 | 1.691 | 1.655 | 3.346 |
| 7 | >80 | 391 | 381 | 700 |

Sumber data : RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas dapat saya simpulkan bahwa jumlah penduduk 8.998 warga, Kalurahan Tirtomartani memiliki potensi tenaga kerja dan produktivitas ekonomi yang cukup tinggi, karena sebagian besar penduduk berada dalam kategori usia produktif, yaitu dari 25 hingga 55 tahun, seperti yang ditunjukkan dalam data Tabel 2.3. Selain itu, terdapat sejumlah besar penduduk usia anak-anak dan remaja (0-18 tahun), sebanyak 5.345 jiwa, yang menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dan layanan untuk perkembangan anak di masa depan. Sebaliknya, usia penduduk lanjut , yaitu usia 56 hingga 79 tahun, dan 700 jiwa usia di atas 80 tahun, juga cukup signifikan. Layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial mungkin diperlukan untuk populasi lanjut usia.

C. Kondisi Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani merumuskan Peraturan Kalurahan Tirtomartani Nomor 5 Tahun 2020. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut tentang struktur organisasi dan tata kerja dalam Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih terorganisir, memperjelas pembagian tugas, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam menjalankan operasional pemerintahan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih optimal dan memadai.

Berikut ini adalah gambaran mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kalurahan Tirtomartani, yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan susunan jabatan yang ada dalam pemerintahan Kalurahan Tirtomartani:

1. Kepala Desa/Lurah
2. Carik, sebagai Kepala Sekretariat, memiliki tanggung jawab mengkoordinasi tiga Kepala Urusan, yang masing-masing mengelola bidang-bidang tertentu yaitu:
 - a) Kepala Urusan TU dan Umum (Tata Laksana)
 - b) Kepala Urusan Keuangan (Danarta)
 - c) Kepala Urusan Pemerintahan (Pangripta)
3. Pelaksanaan teknis tiga Kepala Seksi yang masing-masing bertanggung jawab atas bidangnya terdiri dari:
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan (Jagabaya)
 - b) Kepala Seksi kesejahteraan (Ulu-Ulu)
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Sosial (Kamituwa)
4. Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani memiliki pembagian wilayah yang terdiri dari 17 dukuh, yaitu:
 - a) Glondong
 - b) Krajan
 - c) Karang Kalasan
 - d) Kringinan
 - e) Jarakan
 - f) Sembur
 - g) Brintikan
 - h) Kalibening
 - i) Dhuri
 - j) Bendan

- k) Ngajeg
- l) Karangnongko
- m) Kedulan
- n) Pundung
- o) Kalimati
- p) Jetis
- q) Tegalsari

Selain pejabat-pejabat yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani juga memperoleh dukungan dari tujuh staf yang memiliki peran penting dalam operasional, yaitu:

- a) Supriyanto
- b) Wijayana, A.Md
- c) Rr. Dani Ratna S.Sos
- d) Suparman
- e) Fevi Sugiyanto, S.TP
- f) Dwi Raharjo
- g) Suwardi

Pamong Pemerintah Kalurahan Tirtomartani akan disajikan dalam tabel berikut sesuai dengan pamong pemerintah Kalurahan berdasarkan jabatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Pamong Pemerintah Kalurahan Tirtomartani Berdasarkan Jabatan.

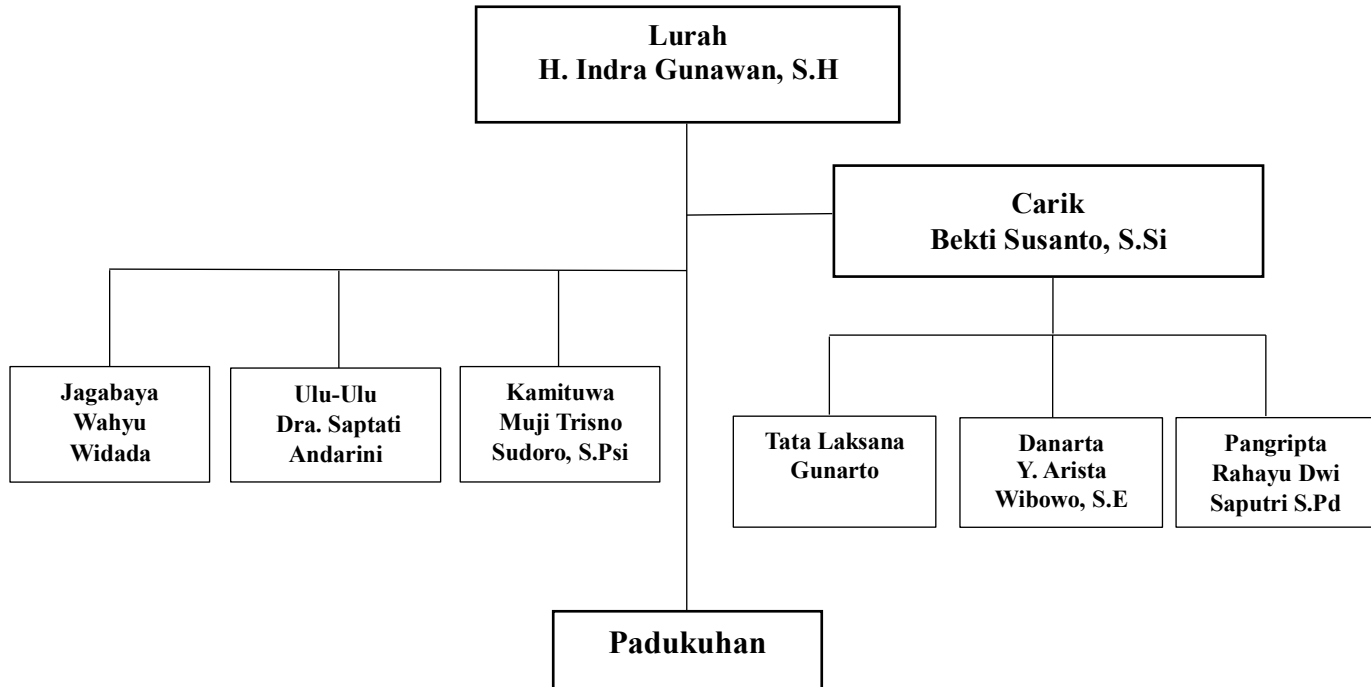
| No | Nama | Jabatan |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | H. Indra Gunawan, S.H | Lurah |
| 2 | Bekti Susanto, S.Si | Carik |
| 3 | Nurdin Hikmawan, S.E | Kaur Tata Laksana |
| 4 | Louis Teguh Kurniawan S.Psi | Kaur Danarta |

| | | |
|----|---------------------------|----------------------|
| 5 | Rahayu Dwi Saputri, S.Pd | Kaur Pangripta |
| 6 | Wahyu Widada | Jagabaya |
| 7 | Dra. Saptati Andarini | Ulu-Ulu |
| 8 | Muji Trisno Sudoro, S.Psi | Kamituwa |
| 9 | Choirul Sholeh | Dukuh Glondong |
| 10 | H. Drs. Arifin Nur Hamzah | Dukuh Krajan |
| 11 | Tukimin | Dukuh Karang Kalasan |
| 12 | Suparna Hadi | Dukuh Kringinan |
| 13 | Muji Semi | Dukuh Jarakan |
| 14 | Dwi Aris Anggoro | Dukuh Sembur |
| 15 | Rohasis Suprihantoro | Dukuh Brintikan |
| 16 | Sumaryanto | Kalibening |
| 17 | Riyanto Suhardono | Dukuh Dhuri |
| 18 | Sigit Wahyudi | Dukuh Bendan |
| 19 | Sugeng Mustofa | Dukuh Ngajeg |
| 20 | Pujianto, S.Pd | Dukuh Karangnongko |
| 21 | Hari Susanto | Dukuh Kedulan |
| 22 | Siswanto, Amd | Dukuh Pundung |
| 23 | Subandi | Dukuh Kalimati |
| 24 | Anton Rohmadi, S.Pd | Dukuh Jetis |
| 25 | Joko Wuryanto | Dukuh Tegalsari |

Sumberdata : RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

Tabel diatas menunjukkan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani terdiri dari 25 pamong, terdiri dari lurah, perangkat, dan kepala wilayah (Dukuh). Setiap pengurus memiliki peran dan keahlian yang diperlukan untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan lancar. Struktur organisasi ini terdiri dari lurah sebagai pemimpin, sekretariat, tata laksana, keuangan dan perencanaan (Danarta dan Pangripta), keamanan, kemakmuran, dan pengelolaan padukuhan. Setiap bagian melakukan pekerjaan tertentu untuk memastikan administrasi yang lancar, stabilitas sosial, dan kemajuan seluruh Kalurahan Tirtomartani.

Struktur Pemerintah Kalurahan Tirtoartan



Sumberdata : RPJM Kalurahan Tirtomartani 2021-2026

2. Visi dan Misi Kalurahan Tirtomartani

Visi

“MEWUJUDKAN KALURAHAN TIRTOMARTANI YANG AMAN, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULIA”

Misi

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa Tirtomartani
2. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, jujur, demokratis, transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang ada.
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, penuh toleransi, saling menghormati, beretika dan berbudi pekerti.

3. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, ditambah dengan Peraturan Desa Tirtomartani Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani kemudian membentuk berbagai lembaga kemasyarakatan di tingkat Kalurahan. Lembaga ini dibentuk sebagai langkah untuk mengelola kewenangan dan menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatan sesuai dengan peraturan yang berlaku:

- 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- 2) Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga
- 3) Karang Taruna
- 4) Rukun Warga
- 5) Rukun Tetangga
- 6) Posyandu
- 7) Satlinmas

D. Profil Desa Wisata Umbul Sidomulyo

1) Sejarah Desa Wisata

Wisata Umbul Sidomulyo mulai dirintis pada akhir Oktober 2019. Ide pembangunan ini muncul dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat RT 08, Dusun Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan. Sebanyak 53 Kepala Keluarga (KK) di wilayah tersebut beberapa keluarga mengalami kesulitan ekonomi yang signifikan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau buruh pabrik, dengan buruh tani dan bangunan sebagai mata pencaharian utama.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan mendalam pada salah satu warga, yaitu Budi Karyono, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengelola Umbul Sidomulyo. Beliau merasa bahwa perubahan harus dimulai tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Pemikiran tersebut menginspirasi Pak Budi untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Ia menyadari bahwa terdapat sumber mata air di belakang rumahnya yang selama ini hanya terbuang sia-sia ke sungai tanpa dimanfaatkan secara optimal. Dengan tekad memajukan kampungnya, Pak Budi Karyono mulai menggagas ide untuk mengubah sumber mata air tersebut menjadi kawasan wisata berbasis *Common Pool Resources* dengan memanfaatkan sumber daya air untuk di kelola bersama masyarakat. Langkah ini diambil tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan buruh yang tidak menjanjikan kestabilan ekonomi. Wisata Umbul Sidomulyo mulai dirintis pada akhir Oktober 2019. Ide pembangunan ini muncul dari permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat RT 08, Dusun Brintikan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan. Kesulitan ekonomi dialami beberapa masyarakat RT 08 Dusun Brintikan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau buruh pabrik, dengan buruh tani dan bangunan sebagai mata pencaharian utama.

Kondisi ini memunculkan keprihatinan mendalam pada salah satu warga, yaitu Budi Karyono, yang kini menjabat sebagai Ketua Pengelola Umbul Sidomulyo. Beliau merasa bahwa perubahan harus dimulai tanpa mengandalkan bantuan pemerintah. Pemikiran tersebut menginspirasi Pak Budi untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Ia menyadari bahwa terdapat sumber mata air di belakang rumahnya yang selama ini hanya terbuang sia-sia ke sungai tanpa dimanfaatkan secara optimal. Dengan tekad memajukan kampungnya, Pak Budi Karyono mulai menggagas ide untuk mengubah sumber mata air tersebut menjadi kawasan wisata berbasis *Common Pool Resources* dengan memanfaatkan sumber daya air untuk di kelola bersama masyarakat. Langkah ini diambil tidak hanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat tetapi juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pekerjaan buruh yang tidak menjanjikan kestabilan ekonomi.

Pak Budi menggunakan pendekatan persuasif yang kuat untuk meyakinkan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang berbeda, inovatif, tetapi tetap rasional. Dalam salah satu pernyataannya, sebagai berikut:

"Kita harus membuat sesuatu yang berbeda, tetapi perbedaan ini harus lebih baik. Kalau kita hanya membuat sesuatu yang biasa, mungkin banyak yang sudah melakukannya. Namun, kita harus membuat hal yang berbeda, yang masuk akal. Harapan satu-satunya adalah mata air ini. Kalian mau ikut saya, atau tetap dengan keadaan yang sama?" (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024)

Keyakinan dan determinasi ini, Pak Budi berhasil menggugah semangat warga. Mereka mulai terlibat secara aktif dalam pembangunan, yang dilakukan dengan semangat gotong royong. Selain itu, Pak Budi juga melihat potensi sumber daya manusia yang ada. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki keterampilan konstruksi. Keterampilan ini menjadi aset penting dalam pembangunan fasilitas wisata. Pak Budi memanfaatkan tenaga tukang lokal untuk mewujudkan proyek ini, sehingga tidak hanya melibatkan

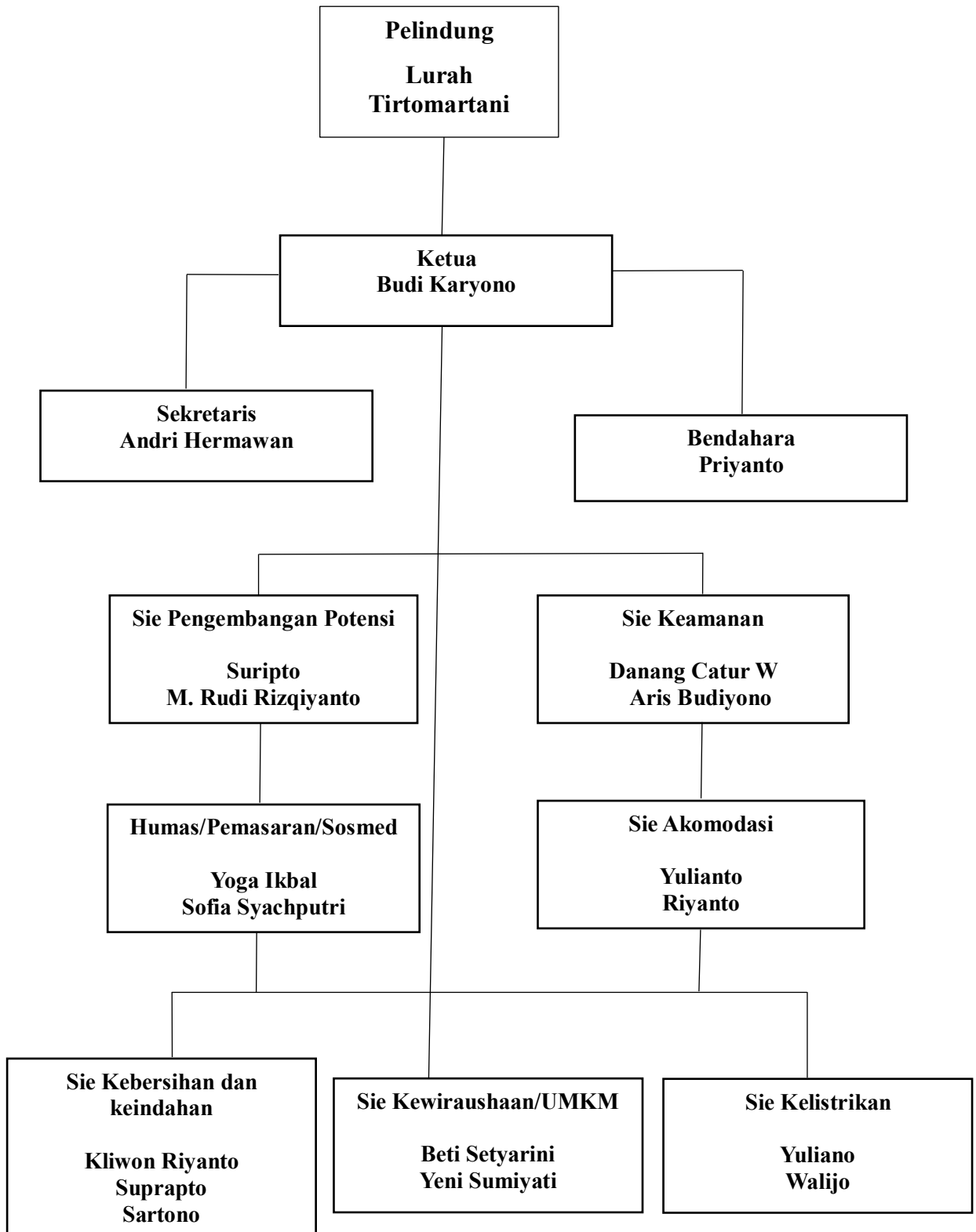
masyarakat secara fisik, tetapi juga memberdayakan mereka secara ekonomi. Pendekatan yang inklusif dan semangat kebersamaan, Umbul Sidomulyo berhasil diwujudkan, memberikan harapan baru bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengelolaan wisata berbasis komunitas.

Proses pendirian Desa Wisata Umbul Sidomulyo disampaikan oleh Bapak Budi Karyono selaku Ketua Umbul Sidomulyo sebagai berikut:

“Desa Wisata Umbul Sidomulyo dimulai pada bulan Oktober tahun 2019 dari pemikiran kami melalui musyawarah bersama masyarakat, jadi umurnya sekarang sekitar 4 tahunan dan baru beroperasi secara optimal kurang lebih 3 tahun. Dari musyawarah bersama ditunjuk pengurus, saya sebagai ketua, Pak Priyanto sebagai sekretaris, Pak Andri Hermawan sebagai sekretaris, dan dibantu oleh seksi-seksi lainnya yang diberi tugas untuk menjalankan Desa Wisata ini agar bisa berkembang dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Melalui musyawarah bersama, sumber daya ini dijadikan umbul dengan nama Umbul Sidomulyo.” (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024)

Pendirian Desa Wisata Umbul Sidomulyo tidak lepas dari keinginan Bapak Budi Karyono untuk menciptakan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dari masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjadi upaya pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Melalui keputusan bersama, Umbul Sidomulyo didirikan sebagai Desa Wisata yang memiliki perputaran ekonomi yang cepat, menyerap banyak tenaga kerja, dan memberikan manfaat langsung untuk meningkatkan pendapatan serta kemakmuran warga sekitar.

2) Struktur Organisasi Desa Wisata Umbul Sidomulyo Kalasan



Sumberdata: Data Lapangan

Pengelolaan operasional wisata Umbul Sidomulyo berada di bawah koordinasi Ketua Umbul Sidomulyo, yang dilindungi oleh Lurah Tirtomartani. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua dibantu oleh pengurus inti yang terdiri atas Bendahara dan Sekretaris. Bendahara bertugas mengelola keuangan, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran, sedangkan Sekretaris bertanggung jawab mengelola administrasi, seperti pengarsipan dokumen dan korespondensi.

Selain pengurus inti, pengelolaan juga didukung oleh beberapa seksi, yaitu Seksi Pengembangan Potensi Desa Wisata yang bertugas mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan daya tarik wisata, Seksi Keamanan yang menjaga keamanan pengunjung termasuk mengawasi anak-anak yang mandi atau bermain, dan Seksi Humas dan Pemasaran yang mempromosikan Desa Wisata melalui media sosial untuk menarik lebih banyak pengunjung. Seksi Kebersihan yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan wisata, Seksi Kewirausahaan yang mengelola harga produk UMKM serta membina para pedagang agar usahanya semakin maju, dan Seksi Kelistrikan yang mengelola kebutuhan listrik operasional wisata. Dalam praktiknya, setiap seksi melaksanakan tugasnya sesuai bidang masing-masing dengan saling berkoordinasi di bawah awasan Ketua. Namun, pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada Ketua karena seluruh tim bekerja secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

3) Prinsip Desa Wisata umbul sidomulyo

- a) Desa Wisata Umbul Sidomulyo didirikan dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Dusun Brintikan. Meskipun tidak memiliki visi tertulis sejak awal pendiriannya, prinsip yang dipegang oleh desa wisata ini adalah mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian sumber daya alam untuk keberlanjutan bersama.
- b) Desa Wisata Umbul Sidomulyo Memberdayakan masyarakat lokal melalui keterlibatan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan sebagai daya tarik

utama wisata. Meningkatkan perekonomian lokal dengan mendukung usaha kecil (UMKM) yang dikelola oleh warga sekitar.

4) Kegiatan usaha desa wisata umbul sidomulyo

- Penjualan tiket masuk wisata
- Penyewaan alat wisata, seperti pelampung dan perlengkapan berenang
- Pengelolaan parkir kendaraan
- Terdapat 4 kolam renang;
 - a. Kolam Dewasa;
 - b. Kolam Anak
 - c. Kolam Waterboom
 - d. Kolam Terapi Kesehatan
- 22 Usaha kecil warga lokal (UMKM), seperti penjualan makanan dan minuman.

5) Bentuk dan fungsi Desa wisata

- a) Umbul Sidomulyo ditetapkan Desa wisata melalui surat keputusan pemerintah Kalurahan dan dinas pariwisata Kabupaten Sleman melalui perda
- b) Desa wisata Umbul sidomulyo berfungsi sebagai organisasi yang mendorong perekonomian dan pemberdayaan masyarakat lokal khususnya Dusun brintikan Tirtomartani.

6) Status kepemilikan Desa wisata

- a) Desa wisata "Umbul Sidomulyo" diurus oleh masyarakat dengan komposisi kepengurusan mayoritas Masyarakat mendominasi dalam kepemilikan masyarakat berperan dalam kepemilikan desa wisata "Umbul Sidomulyo" yang diatur dalam AD/ART dan kepemilikan persen saham.

- b) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian Desa wisata "Umbul Sidomulyo" adalah masyarakat Kalurahan Tirtomartani, Dusun Brintikan RT 08.
- c) Masyarakat mendominasi dalam pengelolaan dan pelaksanaannya, dalam kepemilikan Desa wisata "Umbul Sidomulyo".

7) Struktur organisasi Desa wisata Umbul Sidomulyo

- a) Struktur organisasi Desa Wisata "Umbul sidomulyo" terdiri dari badan pelindung, badan penasehat, dan pengelola.
- b) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah bersama masyarakat sekitar.
- c) Untuk dapat dipilih dalam pengurus Desa Wisata "Umbul Sidomulyo" adalah masyarakat RT 08 yang memenuhi syarat -syarat sebagai berikut:
 - Berdomisili dan menetap di Dusun Brintikan RT 08
 - Memiliki kepribadian yang Jujur, aktif dan baik
 - Memiliki jiwa wirausaha
 - Mempunyai wawasan yang cukup dalam mengelola dan mengembangkan Desa Wisata sesuai seksi yang di tentukan
- d) Pengurus/ pengelola Desa wisata terdiri dari Pelindung, ketua, sekretaris, Bendahara, seksi pengembangan potensi, seksi keamanan, Humas/pemasaran, seksi akomodasi, seksi kebersihan, seksi kewirausahaan, dan seksi kelistrikan.
- e) Untuk mengisi pengurus yang kosong atau pergantian pengurus dilakukan pemilihan melalui musyawarah bersama.

BAB III

PENGELOLAAN DESA WISATA UMBUL SIDMULYO TERHADAP KEMAKMURAN WARGA

A. Deskripsi Informan

Analisis data merupakan proses pengolahan informasi yang diperoleh dari penelitian di Kalurahan Tirtomartani, yang berfokus pada Governing Pemerintah Kalurahan dalam Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dan pemanfaatan sumber daya bersama yang dilakukan kelompok sadar wisata. Proses ini mencakup pengolahan dan penyusunan data untuk mendukung temuan penelitian yang akan disampaikan oleh penulis. Data yang dianalisis berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan dan mencakup informasi seperti nama, jenis kelamin, serta jabatan atau profesi dari narasumber.

Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kondisi nyata di lapangan. Mereka terlibat langsung dalam berbagai aspek, seperti pengaturan, perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan desa wisata Umbul Sidomulyo, penerapan dan perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya bersama, serta pengelolaan oleh kelompok sadar wisata. Semua ini memberikan dampak langsung terhadap kemakmuran warga. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara ini dapat dipastikan valid, dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam penelitian yang berfokus pada *governing* pemerintah kalurahan Tirtomartani pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dan dampaknya pengelolaan bagi kemakmuran warga Kalurahan Tirtomartani, peneliti melibatkan 12 narasumber sebagai sumber informasi. Narasumber tersebut terdiri dari berbagai pihak yang memiliki peran dan pandangan yang relevan, yaitu perwakilan dari Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, pengelola desa wisata Umbul Sidomulyo, tokoh masyarakat, serta pengunjung wisata. Pemilihan narasumber ini bertujuan untuk memperoleh data yang beragam dan komprehensif, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pengaturan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan dampak

pengelolaan Desa Wisata tersebut. Berikut ini adalah daftar informasi yang diperoleh dari narasumber:

Tabel 3. 1 Narasumber yang menjadi Subjek Penelitian

| No | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan/Profesi |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1 | Bekti Susanto, S.Si | Laki -laki | Carik |
| 2 | Muhari, SH. | Laki-laki | Adyatama Kemenparekraf Sleman |
| 3 | Budi Karyono | Laki-laki | Ketua umbul sidmulyo |
| 4 | Priyanto | Laki-laki | Bendahara umbul Sidmulyo |
| 5 | Danang Catur Wijara | Laki-laki | Seksi keamanan |
| 6 | Yoga Ikbal Prasetya | Laki-laki | Seksi Humas/Pemasaran |
| 7 | Titin | Perempuan | Pelaku UMKM/Masyarakat setempat |
| 8 | Dwi Suryanti | Perempuan | Pelaku UMKM/masyarakat setempat |
| 9 | Muhammad Aldy F | Laki-laki | Masyarakat setempat |
| 10 | Andika Rangga S | Laki-laki | Masyarakat setempat |
| 11 | M. Riefqi Fergiansyah | Laki-laki | Pengunjung |
| 12 | Susiana Cindy | Perempuan | Pengunjung |

Sumber Data Primer 2024

Berdasarkan data dari informan, peneliti menyimpulkan bahwa mayoritas narasumber yang diwawancarai merupakan masyarakat asli Kalurahan Tirtomartani. Para informan ini memiliki latar belakang yang beragam, termasuk perwakilan dari Pemerintah Kalurahan dan Dinas Pariwisata Sleman, pengelola desa wisata, masyarakat setempat, dan pengunjung. Selain itu, mereka juga berasal dari berbagai profesi, sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda-beda. Keberagaman latar belakang ini dipilih dengan tujuan untuk memastikan kebenaran data melalui triangulasi informasi di lapangan.

Untuk mendukung sistematika analisis data, peneliti menganalisis hasil penelitian dengan merujuk pada ruang lingkup penelitian yang telah ditentukan. Pendekatan ini dilakukan agar hasil analisis dapat menggambarkan Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dan dampaknya terhadap kemakmuran warga secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk lebih lanjut sebagai berikut pembahasan hasil analisis data wawancara penelitian sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

B. Pelayanan Wisata Umbul Sidomulyo

Berbicara mengenai *governing* pemerintah Kalurahan Tirtomartani terhadap desa wisata umbul sidomulyo peneliti melakukan wawancara dengan ketua organisasi desa wisata untuk mengetahui pelayanan desa wisata umbul sidomulyo, berikut kutipan dari pernyataan Pak Budi Karyono mengenai pelaku pelayanan wisata umbul Sidomulyo:

"Untuk pelayanan desa wisata ini kami lakukan secara mandiri atau semuanya dilakukan oleh Pokdarwis. Pengelolaan desa wisata ini dilakukan oleh Pokdarwis. Kami yang mengelola fasilitas, pemasaran, dan bahkan urusan administrasi. Pemerintah kalurahan hingga saat ini bisa dikatakan tidak hadir terlibat. Misalnya, terkait legalitas usaha dan penggunaan tanah Kasultanan Ground, itu masih sepenuhnya diusahakan oleh kami. Sudah berusaha mediasi dengan pihak lain bahkan saya setiap bulannya ke kalurahan untuk meminta kepastian penggunaan lahan Kasultanan." (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa jelas terlihat bahwa perbuatan pemerintah kalurahan dalam mendukung pengelolaan desa wisata masih sangat minim. Hal ini menimbulkan beban tambahan bagi Pokdarwis yang harus mengurus segala aspek secara mandiri, termasuk administrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Minimnya dukungan ini tidak hanya menghambat operasional, tetapi juga memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memfasilitasi pengelolaan legalitas desa wisata yang vital untuk keberlangsungan jangka panjang. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Pokdarwis, Priyanto, yang juga menyampaikan keluhan serupa:

"Kami di Pokdarwis harus mengambil inisiatif sendiri untuk menjalankan semua kegiatan. Pemerintah kalurahan belum hadir secara nyata dalam pelayanan administrasi atau pendampingan terkait pelayanan desa wisata ini. Sebenarnya karena kami merasa perlu dukungan yang lebih kuat, terutama terkait legalitas usaha dan pengembangan fasilitas wisata." (Priyanto, wawancara, 01/12/2024).

Pernyataan Priyanto menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah kalurahan untuk terlibat dalam pelayanan administrasi. Minimnya keterlibatan ini menciptakan hambatan struktural yang signifikan, terutama dalam pengurusan legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perbuatan pemerintah Kalurahan memberikan dukungan yang sangat diperlukan dalam aspek fundamental yang berdampak pada pengembangan desa wisata.

Peneliti kemudian mewawancarai Danang Catur Wijara, yang menjabat sebagai Seksi Keamanan di Pokdarwis. Ia menyatakan:

"Pokdarwis melakukan semua pengelolaan secara mandiri, kalau tunggu pemerintah kayaknya nggak akan terlaksana, mas. Gak tahu kapan mereka mau hadir ikut dalam mengelola desa wisata ini, tetapi kami Pokdarwis juga bisa melakukan pelayanan terhadap pengunjung. Yang kami tidak bisa mengurus adalah surat izin usaha karena harus melalui kalurahan untuk legalitas lahan Kasultanan." (Danang Catur Wijara, wawancara, 27/11/2024).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ada ketergantungan Pokdarwis pada pemerintah kalurahan dalam pengurusan legalitas lahan. Namun, lambatnya tindakan perbuatan pemerintah menyebabkan proses ini terhambat. Ketidakhadiran pemerintah dalam mendukung proses administratif dasar menciptakan kesenjangan serius dalam tata kelola yang seharusnya bersifat kolaboratif antara masyarakat dan pemerintah. Peneliti melanjutkan wawancara dengan Yoga Ikbil Prasetya, Seksi Humas/Pemasaran Pokdarwis. Ia mengungkapkan:

"Kalau ngomongin pelayanan wisata sih kami semua yang urus, mas. Bahkan dari pembangunan dan pelaksanaan desa wisata ini sampai sekarang saya tidak melihat pemerintah begitu peduli terhadap kami. Kalau menurut saya, ya bisa dikatakan lambat kepengurusan dan pelayanan pihak kalurahan kami. Padahal, kami sudah bisa mandiri, pemerintah ngurusin

perizinan dari dulu masih proses sampai sekarang." (Yoga Ikbal Prasetya, wawancara, 01/12/2024).

Gambar 3. 1 Pelayanan Desa Wisata yang dilakukan Pokdarwis



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 01 Desember 2024

Gambar 3.1 menunjukkan pelayanan Desa Wisata Umbul Sidomulyo penjagaan loket yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata Terhadap para pengunjung, petugas dalam pelayanan desa wisata dari masyarakat lokal.

Pernyataan yoga menekankan bahwa keterlibatan pemerintah yang minim tidak hanya memperlambat perkembangan desa wisata tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi Pokdarwis dalam pengelolaan legalitas. Hal ini memperlihatkan lemahnya kapasitas perbuatan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat yang sudah berinisiatif mandiri, sehingga potensi kolaborasi yang lebih besar tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Peneliti kemudian mewawancarai Andika Rangga Saputra, anggota Pokdarwis sekaligus masyarakat setempat. Ia menjelaskan:

"Desa wisata ini dikelola sepenuhnya oleh kami, mas. Jadi kalau pelayanan ya kami juga yang mengelolanya. Kami di sini bersama-sama mengurus, mengatur, dan mengelola juga kami lakukan dengan musyawarah biasanya. Kalau pemerintah memang belum ada ikut serta, paling memberi surat keputusan desa wisata itu saja." (Andika Rangga Saputra, wawancara, 01/12/2024).

Penyataan andika memperkuat temuan bahwa pemerintah kalurahan belum memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan desa wisata. Pembuatan pemerintah terbatas pada formalitas administratif tanpa dukungan operasional nyata. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi fungsi utamanya sebagai fasilitator dan pendukung pembangunan masyarakat lokal.

Gambar 3. 2 Pokdarwis Desa Wisata Umbul Sidomulyo ikutserta dalam seminar pelayanan Kepariwisataaan 2024



Sumber: Humas/Sosmed Desa Wisata Umbul Sidomulyo

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa Kelompok Sadar wisata Umbul Sidomulyo berinisiatif ikut serta dalam seminar/sosialisasi pada tahun 2024 yang dilakukan oleh para pelaku Desa Wisata Untuk memperluas Pengelolaan dan Pelayanan Kepariwisataaan

Selanjutnya peneliti mewawancarai Carik Kalurahan, Bakti Susanto, S.Si. Peneliti menanyakan, "Apa perbuatan pemerintah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam pelayanan desa wisata Umbul Sidomulyo, Pak Bakti susanto menyampaikan:

"Kami sebenarnya mendukung keberadaan desa wisata ini, tetapi memang ada keterbatasan dari pelayanan dari kami untuk desa wisata ini di kalurahan. Hingga saat ini, pengelolaan dan pelayanan desa wisata masih

lebih banyak dilakukan oleh Pokdarwis. Untuk masalah administrasi legalitas usaha, itu masih dalam proses, dan kami belum bisa memberikan solusi cepat karena harus melibatkan pihak-pihak lain, seperti instansi yang mengelola tanah Kasultanan Ground." (Bekti Susanto, S. Si, wawancara 03/12/2024).

Dari wawancara dengan pak Bekti Susanto pemerintah kalurahan mengakui keterbatasan mereka dalam memberikan pelayanan. Meskipun ada niat mendukung, tindakan konkret yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan desa wisata belum terlihat. Keterlambatan dan kurangnya koordinasi lintas instansi menunjukkan adanya disfungsi birokrasi yang menjadi penghambat utama pengelolaan desa wisata.

Temuan penelitian Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam pelayanan desa wisata Umbul Sidomulyo masih sangat terbatas. Pemerintah belum memberikan dukungan yang signifikan, baik dalam aspek administrasi legalitas maupun pendampingan operasional, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi pengelolaan desa wisata. Seluruh pengelolaan dan pelayanan selama ini sepenuhnya dilakukan oleh Pokdarwis, yang secara mandiri menangani aspek-aspek penting seperti fasilitas, pemasaran, hingga penyelesaian konflik administratif. Ketidakhadiran perbuatan pemerintah tidak hanya menciptakan beban tambahan bagi Pokdarwis tetapi juga menghambat proses legalitas yang sangat diperlukan untuk keberlanjutan desa wisata. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya kegagalan pemerintah dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai pengelola utama tata kelola desa wisata yang terintegrasi. Temuan ini menegaskan perlunya perbuatan pemerintah kalurahan dalam mengurus dan mengatur pelayanan desa wisata, dengan fokus pada peningkatan kapasitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pemberian dukungan teknis serta administratif yang memadai. Tanpa langkah nyata, keberlanjutan Desa Wisata Umbul Sidomulyo akan terus bergantung pada kemampuan Pokdarwis yang memiliki keterbatasan sumber daya dan kewenangan.

C. Sumber dana Desa Wisata

Pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, khususnya peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Namun, dalam proses pembangunan ini, keterlibatan pemerintah kalurahan Tirtomartani tampaknya sangat terbatas. Peneliti menelusuri lebih dalam dari mana sumber dana diperoleh, serta bagaimana perbuatan pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan desa wisata tersebut. Peneliti pertama kali mewawancarai Ketua Pokdarwis, Bapak Budi Karyono, untuk memahami dari mana sumber dana awal diperoleh dan bagaimana proses pembangunan berlangsung. Ia menyampaikan:

“Karena pembangunan desa wisata ini dari rasa keprihatinan saya untuk bantu masyarakat sekitaran saya, jadi dana pembangunan ini berasal dari saya yang konsisten menyisihkan 10 juta perbulannya untuk pemabangunan, saya berpikir jika setiap kk saya berikan uang maka itu akan habis dalam waktu yang singkat, jika di jadikan tempat wisata ini akan membuka peluang pekerjaan yang besar dan berkelanjutan.” (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024).

Dari pernyataan Budi Karyono, terlihat bahwa inisiatif pembangunan desa wisata muncul dari rasa keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Ia menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan menyisihkan dana pribadi sebanyak 10 juta setiap bulannya secara konsisten untuk mendukung pembangunan desa wisata. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dalam menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan, daripada memberikan bantuan langsung yang sifatnya hanya sementara. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang rendah terhadap dukungan eksternal, terutama dari pemerintah. Selanjutnya peneliti menanyakan kontribusi perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam membantu sumber dana desa wisata kepada Pak Budi karyono beliau menyampaikan:

“Dari awal pembangunan saya memang sudah memikirkan bagaimana kami bisa menstabilkan perekonomian masyarakat secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari pemerintah, pemerintah tidak begitu hadir dalam pembangunan desa wisata ini, sebenanrnya lucu jika ngomongin bantuan dari pemerintah sekarang saja kami yang memberikan iuran dari

hasil desa wisata ini ke pemerintah kalurahan setiap bulannya senilai 1 juta, setiap bulan saya kasi ke kalurahan digunakan untuk apa juga saya kurang tau.” (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024).

Dari hasil wawancara ini menggarisbawahi minimnya peran pemerintah kalurahan dalam mendukung pembangunan desa wisata. Bahkan, alih-alih menerima bantuan, Pokdarwis justru diwajibkan memberikan kontribusi finansial kepada pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya pola hubungan yang kurang seimbang, di mana pemerintah hanya mengambil manfaat tanpa memberikan dukungan nyata dalam bentuk bantuan atau fasilitasi. Ketidaktahuan Budi Karyono tentang penggunaan dana yang diberikan juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana oleh pihak pemerintah kalurahan. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Priyanto selaku bendahara desa wisata umbul sidomulyo ia menyampaikan bahwa:

“Pembangunan desa wisata ini kebanyakan sumber dananya dari pak budi bisa dikatakan sebagai pemodal dari terbentuknya desa wisata ini, tetapi masyarakat lainnya juga banyak yang menyumbangkan bahan material, penggunaan tanah dan ada juga yang bantu berupa uang, kalau pemerintah kalurahan mereka tidak membantu berupa uang dalam pembangunan, yang ada malah kami yang menyisihkan dan memberikan iuran kepada mereka setiap bulannya.” (Priyanto, wawancara, 01/12/2024).

Pernyataan Priyanto menegaskan bahwa sumber dana utama berasal dari Budi Karyono sebagai individu. Namun, ada kontribusi kolektif dari masyarakat setempat dalam bentuk bahan material, penggunaan lahan, dan donasi uang. Fakta bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan dana sama sekali, tetapi justru menerima iuran bulanan, semakin menguatkan kesan bahwa pemerintah belum hadir secara efektif dalam mendukung inisiatif masyarakat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang fungsi pemerintah dalam membina dan memfasilitasi pengembangan desa wisata sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan lainnya untuk mendalami sumber dana pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dikelola dan peran pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah kalurahan. Berdasarkan hasil wawancara,

ditemukan bahwa pembangunan ini berjalan melalui upaya swadaya dan gotong-royong masyarakat, dengan minimnya dukungan dari pemerintah kalurahan. Dalam wawancara, Bapak Danang Catur Wijara, selaku seksi keamanan, menjelaskan:

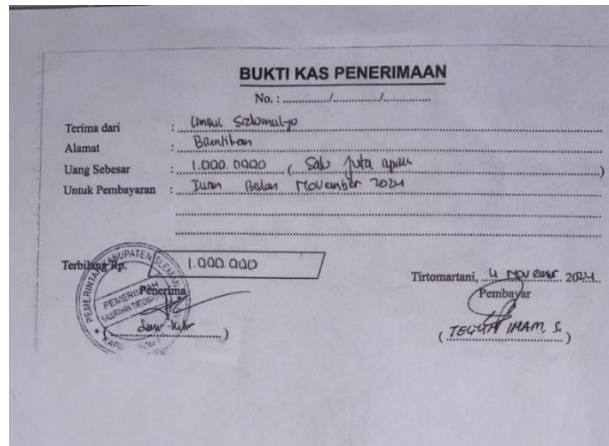
"Selama ini, pembangunan desa wisata ini murni hasil dari upaya Pak Budi dan masyarakat. Tidak ada dana atau bantuan apa pun dari pemerintah kalurahan. Bahkan, setiap bulan kami harus menyetor iuran ke pemerintah kalurahan sebesar satu juta rupiah. Jujur, saya tidak tahu uang itu dipakai untuk apa, dan kami juga tidak mendapatkan laporan apa pun soal penggunaannya." (Danang Catur Wijara, wawancara, 27/11/2024).

Pendapat serupa disampaikan oleh Yoga Ikbal Prasetya, seksi humas/pemasaran. Ia menguraikan sumber dana Pembangunan desa wisata ini dimulai dan berjalan:

"Pembangunan ini dimulai dari dana pribadi Pak Budi yang menyisihkan penghasilan setiap bulannya. Selain itu, masyarakat di sekitar juga banyak yang ikut membantu, entah menyumbang uang, material, atau tenaga. Pemerintah kalurahan tidak pernah terlibat aktif dalam pendanaan atau mendukung langsung pembangunan ini. Sebaliknya, kami malah harus memberikan iuran bulanan ke mereka." (Yoga Ikbal Prasetya, wawancara 01/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoga Ikbal Prasetya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo sepenuhnya didorong oleh dana pribadi Pak Budi yang secara konsisten menyisihkan penghasilannya setiap bulan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk sumbangan uang, material, dan tenaga menunjukkan kuatnya semangat gotong-royong di antara warga. Namun, hal ini juga menyoroti minimnya perbuatan pemerintah kalurahan, yang seharusnya bertindak sebagai fasilitator utama dalam pembangunan desa wisata. Bahkan, alih-alih memberikan bantuan, pemerintah kalurahan justru memberlakukan iuran bulanan yang harus dibayarkan oleh masyarakat tanpa ada kejelasan mengenai penggunaannya. Situasi ini mencerminkan minimnya keterlibatan dan akuntabilitas pemerintah, serta menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sepenuhnya bergantung pada inisiatif warga dan kepemimpinan lokal.

Gambar 3. 3 Bukti kas Penerimaan Iuran Bulanan



Sumberdata: Bendahara desa wisata Umbul Sidomulyo

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa Kalurahan Tirtomartani menerima iuran berupa uang yang diberikan oleh pokdarwis Umbul Sidomulyo setiap bulannya, data ini menunjukkan bukti penerimaan iuran pada 4 November 2024 oleh Kalurahan Tirtomartani senilai 1.000.000 rupiah, pemberian iuran ini dipergunakan untuk apa juga tidak tau hal itu yang disampaikan pak Budi Karyono.

Peneliti juga menggali lebih dalam dari sisi pelaku UMKM yang terlibat dalam pengembangan desa wisata ini. Titin, salah satu pelaku UMKM, menegaskan pentingnya kontribusi masyarakat RT 08 dan kepemimpinan Pak Budi dalam keberlanjutan pembangunan:

"Kalau bicara soal dana, memang semua ini dari Pak Budi dan warga RT 08. Tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Bahkan, banyak dari kami warga yang memberikan lahan dan barang-barang untuk pembangunan desa wisata ini." (Titin, wawancara, 27/11/2024).

Senada dengan hal tersebut, Dwi Suryanti, pelaku UMKM lainnya, menekankan sumber dana dan gotong-royong menjadi landasan utama pembangunan desa wisata:

"Sebagai warga, kami sangat mengapresiasi usaha Pak Budi yang dengan rela menyisihkan penghasilannya untuk desa wisata ini. Kami juga banyak membantu, baik berupa uang, material, atau tenaga. Semua ini hasil gotong-

royong warga RT 08 dan tekad dari Pak Budi.” (Dwi Suryanti, wawancara 27/11/2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan temuan di lapangan terkait sumber dana pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana yang digunakan dalam pembangunan desa wisata ini berasal dari upaya swadaya masyarakat, dengan kontribusi signifikan dari Bapak Budi Karyono sebagai pemimpin lokal. Beliau secara konsisten menyisihkan dana pribadi sebanyak 10 juta rupiah setiap bulannya untuk mendukung pembangunan, Namun, yang sangat mencolok dalam temuan ini adalah minimnya perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam mendukung pembangunan desa wisata tersebut. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak, pemerintah kalurahan tidak terlibat langsung dalam pendanaan atau pengelolaan pembangunan desa wisata. Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya, di mana Pokdarwis Umbul Sidomulyo memberikan iuran bulanan sebesar satu juta rupiah kepada pemerintah kalurahan, meskipun tidak ada kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Budi Karyono dan beberapa informan lainnya, yang menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui tujuan atau manfaat dari iuran yang dibayarkan tersebut.

Temuan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara pemerintah kalurahan dan masyarakat. Pemerintah, yang seharusnya berperan sebagai fasilitator dan pendukung utama dalam pengembangan desa wisata, justru tidak hadir dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan. Minimnya perbuatan pemerintah dalam pembangunan desa wisata ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan dalam mendukung inisiatif masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata.

D. Program Pemberdayaan Terhadap Pokdarwis

Berbicara tentang program pemberdayaan terhadap pokdarwis peneliti melakukan wawancara dengan Andika Ranga selaku anggota kelompok pokdarwis umbul Sidomulyo untuk mengetahui terkait bagaimana bentuk peran pemerintah dalam program pemberdayaan terhadap pokdarwis, berikut kutipan dari pernyataan Andika ranga:

“Pokdarwis sebenarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan desa wisata. Namun, kami merasa masih ada kekurangan dari pihak pemerintah kalurahan dalam memberikan program pemberdayaan yang tepat untuk mengelola potensi ini. Meskipun begitu, kami sebagai Pokdarwis tidak tinggal diam. Kami berinisiatif untuk mengikuti berbagai seminar dan pelatihan tentang pengelolaan desa wisata agar bisa lebih maksimal dalam mengembangkan potensi yang ada.” (Andika Ranga Saputra, wawancara 01/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan kurangnya dukungan perbuatan dari pemerintah kalurahan dalam hal pemberdayaan Pokdarwis. Meskipun demikian, Pokdarwis menunjukkan semangat mandiri dengan mengikuti seminar dan pelatihan untuk memperbaiki pengelolaan desa wisata. Hal ini menggambarkan ketergantungan yang rendah pada pemerintah dalam proses pemberdayaan. Dalam wawancara lanjutan, peneliti menanyakan kepada Yoga Ikbil Prasetya yang merupakan anggota pokdarwis juga di lokasi wisata umbul Sidomulyo, Terkait bagaimana bentuk program pemberdayaan terhadap pokdarwis. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh Yoga Ikbil Prasetya:

“Betul, memang tanpa adanya dukungan langsung dari pemerintah kalurahan, kami merasa perlu untuk berinisiatif sendiri. Kami mengikuti seminar-seminar tersebut karena kami ingin mempelajari cara-cara terbaik dalam mengelola desa wisata. Selain itu, kami juga ingin memperluas wawasan kami tentang potensi yang bisa digali dari desa ini. Ini semua dilakukan untuk membangun desa kami dengan lebih baik dan lebih mandiri.” (Yoga Ikbil Prasetya, wawancara 01/12/2024).

Kutipan wawancara menekankan bahwa tanpa bantuan dari pemerintah kalurahan, Pokdarwis harus berinisiatif sendiri. Mereka mencari pengetahuan tambahan melalui seminar untuk memaksimalkan potensi desa wisata. Hal ini

menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan kurang aktif memberikan dukungan praktis dalam pemberdayaan. Argumen ini diperkuat oleh anggota pokdarwis yaitu Priyanto yang menjabat sebagai bendaraha umbul Sidomulyo. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Priyanto:

“Kami sangat terbantu dengan arahan dan dukungan dari Pak Budi, yang merupakan ketua Pokdarwis. Beliau memberikan banyak masukan dan bimbingan kepada kami. Pak Budi sangat memahami tantangan yang kami hadapi dan selalu memberikan solusi yang tepat. Tanpa dukungan beliau, kami mungkin akan kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pengembangan desa wisata ini.” (Priyanto, wawancara, 01/12/2024).

Hal serupa juga ditegaskan Priyanto mengakui bahwa keberhasilan Pokdarwis sangat bergantung pada kepemimpinan Budi Karyono, yang memberikan bimbingan dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan pemerintah kalurahan lebih kecil dibandingkan peran individu dalam memajukan desa wisata. Dalam wawancara lanjutan, peneliti menanyakan kepada Budi Karyono yang merupakan ketua pokdarwis juga di lokasi wisata umbul Sidomulyo, Terkait bagaimana harapannya kepada pemerintah untuk ikut adil dalam memberi program pemberdayaan terhadap pokdarwis. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Budi Karyono:

“Benar sekali. Kami memang berharap pemerintah kalurahan bisa lebih memberikan perhatian dan program pemberdayaan yang lebih mendalam lagi. Namun, kami tidak mau hanya bergantung pada pemerintah saya juga memiliki relasi dengan pelaku desa wisata lain jadi jika ada seminar tentang desa wisata untuk pemberdayaan para pengelola desa wisata saya ikutsertakan supaya mereka tau pengelolaan desa wisata itu juga berdampak baik untuk kami.” (Budi Karyono, wawancara 26/11/ 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Karyono, pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Pokdarwis Umbul Sidomulyo berharap pemerintah kalurahan memberikan perhatian lebih dan program pemberdayaan yang lebih mendalam, Budi menegaskan bahwa mereka tidak bergantung sepenuhnya pada dukungan pemerintah. Budi juga menunjukkan inisiatifnya yang lebih proaktif dengan membangun relasi dengan pelaku desa wisata lain, sehingga mereka bisa

mengikuti seminar-seminar untuk memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata. Ini mencerminkan usaha yang lebih besar dari pihak Pokdarwis untuk mengelola desa wisata secara mandiri dengan memperluas wawasan dan pengalaman mereka.

Setelah melakukan wawancara dengan organisasi Kelompok Sadar Wisata, peneliti melanjutkan wawancara langsung kepada pemerintah Kalurahan Tirtomartani. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai perbuatan pemerintah dalam memberikan pemberdayaan terhadap Pokdarwis dalam mengelola desa wisata dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap pokdarwis desa wisata umbul Sidomulyo berikut kutipan wawancara yang disampaikan Pak Bkti Susanto S. Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani, berikut pernyataannya:

“untuk program pemberdayaan belum ada kami lakukan, namun sudah banyak juga pemberdayaan yang dilakukan untuk desa wisata ini mereka inisiatif belajar sendiri bagaimana mengelolanya, biasanya juga ada pemberdayaan dari anak anak kampus dari amikom dari ampta untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka saling bertukar pengetahuan untuk pengelolaan desa wisata.” (Bkti Susanto, S. Si, wawancara 03/12/2024).

Berdasarkan wawancara dengan Pak Bkti Susanto, Carik Kalurahan Tirtomartani, pemerintah kalurahan belum memiliki program pemberdayaan spesifik untuk Pokdarwis dalam mengelola desa wisata. Meskipun begitu, Pokdarwis telah menunjukkan inisiatif mandiri untuk belajar mengelola desa wisata. Selain itu, pemberdayaan yang terjadi lebih banyak berasal dari pihak eksternal, seperti mahasiswa dari universitas Amikom dan AMPTA, yang memberikan pelatihan dan pertukaran pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lebih bergantung pada inisiatif luar daripada program dari pemerintah kalurahan.

Gambar 3. 4 Sosialisasi Media Marketing dan Workshop Terhadap Pokdarwis



Sumber: Humas/Sosmed Desa Wisata Umbul Sidomulyo

Gambar 3.4 meunjukkan Pemberdayaan terhadap Kelompok Sadar Wisata Umbul Sidomulyo, dilakukan dengan Sosialisasi dari kampus-kampus seperti Amikom dalam sosialisasi tentang pemanfaatan sosial media dan Digital Marketing dan Workshop Fotografi

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, temuan menunjukkan minimnya perbuatan pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam menyediakan program pemberdayaan yang konkret untuk Pokdarwis dalam mengelola desa wisata. Pemerintah kalurahan belum memiliki program pemberdayaan yang terstruktur dan langsung menyentuh kebutuhan Pokdarwis, dan pemberdayaan lebih banyak datang dari inisiatif eksternal seperti mahasiswa universitas Amikom dan AMPTA yang memberikan pelatihan. Namun, Pokdarwis tidak hanya diam mereka berinisiatif mengikuti seminar-seminar dan pelatihan terkait pengelolaan desa wisata untuk memperluas pengetahuan mereka. Keberhasilan Pokdarwis juga sangat bergantung pada bimbingan dari Pak Budi Karyono, ketua Pokdarwis, yang memberikan arahan dan solusi terhadap tantangan yang dihadapi. Pak Budi juga aktif membangun relasi dengan pelaku desa wisata lain dan memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti seminar guna memperdalam

pengelolaan desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa peran individu, terutama Pak Budi, lebih dominan dalam memberikan arahan kepada Pokdarwis dibandingkan dengan pemerintah kalurahan. Secara keseluruhan, meskipun Pokdarwis telah menunjukkan semangat mandiri, perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam pemberdayaan Pokdarwis masih sangat terbatas, dan pemerintah perlu lebih aktif dalam menyediakan program pemberdayaan yang dapat mendukung pengelolaan desa wisata.

Gambar 3. 5 Inisiatif Pokdarwis ikut serta dalam seminar pengelolaan Desa Wisata



Sumber: Humas/Sosmed Desa Wisata Umbul Sidomulyo

Gambar 3.5 menunjukkan inisiatif dari Pokdarwis mengikuti setiap adanya seminar/ sosialisasi tentang pemberdayaan dan pengelolaan Desa Wisata untuk memperluas pengetahuan

E. Perlindungan kepada pengunjung

Berbicara tentang perlindungan kepada peneliti melakukan wawancara dengan Danang catur wijara selaku seksi keamanan umbul Sidomulyo untuk mengetahui terkait bagaimana bentuk perlindungan kepada pengunjung umbul Sidomulyo, berikut kutipan dari pernyataan pak Danang catur wijara:

“Saya sendiri sering kali mengikuti seminar. Terakhir kali saya menghadiri seminar yang mengedukasi tentang keterampilan bagaimana tindakan pertama pada korban bila terjadi kecelakaan(tenggelam) tapi saya datang atas inisiatif saya sendiri hal ini sangat diperlukan bagi saya jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di lokasi wisata, hal ini sebagai bentuk pertolongan pertama karena ditempat ini tidak memiliki perlengkapan yang memadai terkait perlindungan pengunjung hanya ada kotak p3k yang disiapkan disini, sedangkan dari pemerintahnya sendiri tidak ada tindakan yang pasti untuk perlindungan terhadap pengunjung desa wisata” (Danang Catur Wijara, wawancara, 27/11/2024).

Dari kutipan wawancara dengan pak Danang catur wijara menjelaskan bahwa Pokdarwis melakukan semua pengelolaan secara mandiri, termasuk menjaga keamanan pengunjung dan fasilitas. Belum ada bantuan konkret dari pemerintah kalurahan untuk mendukung tugas kami, baik berupa pelatihan atau fasilitas tambahan .

Dalam wawancara lanjutan, peneliti menanyakan kepada ibu Titin yang merupakan pelaku umkm di lokasi wisata umbul Sidomulyo Terkait bagaimana bentuk perlindungan pengunjung dari pihak wisata. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh ibu Titin:

“Disini ada pengawas yang memantau sekitaran kolam disini kan mayoritas anak-anak yang berkunjung, kadang ada yang sama orang tua ada yang bareng temannya, kita nga tau kalo misal ada anak-anak yang mandi terus berenang ke kolam khusus dewasa bakal di peringatin sama petugas, karna kolam nya lumayan dalam disuruh pindah ke kolam khusus anak-anak yang pasti aman agar terhindar dari hal-hal yang nga kita inginkan. Itu salah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pihak wisata, disini kita juga siapin tempat penyimpanan barang jadi barang pengunjung udah pasti bakal tetap aman.” (Titin, wawancara, 27/11/2024).

Berdasarkan wawancara dengan Titin, yang menjelaskan tentang upaya perlindungan yang dilakukan di Wisata Umbul Sidomulyo, terlihat bahwa pengelola wisata sudah memperhatikan keselamatan pengunjung, terutama anak-anak. Pengawasan terhadap pengunjung dilakukan oleh petugas untuk memastikan bahwa anak-anak tidak berenang di kolam dewasa yang lebih dalam, dan diarahkan ke kolam yang lebih aman. Selain itu, pengelola juga menyediakan tempat penyimpanan barang untuk menjaga keamanan barang pengunjung. Meskipun

demikian, langkah-langkah perlindungan ini sangat bergantung pada pengelola, yang berinisiatif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pengunjung, namun ini juga menunjukkan pentingnya dukungan dari pihak luar, terutama pemerintah, untuk memperkuat upaya perlindungan yang ada. Dalam wawancara lanjutan, peneliti menanyakan kepada Pak Budi terkait bagaimana perbuatan dari pemerintah terkait bentuk perlindungan pengunjung Wisata Umbul Sidomulyo. Berikut pernyataan yang disampaikan Pak Budi terkait keterlibatan pemerintah:

“kami merasa ada kekurangan dukungan dari pemerintah dalam hal perlindungan pengunjung di sini. Kami sebagai pengelola berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, namun tanpa bantuan atau regulasi yang lebih tegas dari pemerintah, kami merasa sulit untuk mengoptimalkan beberapa aspek, seperti pengawasan yang lebih ketat atau peningkatan infrastruktur yang lebih mendukung keselamatan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Pertama, misalnya, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan pelatihan keselamatan untuk petugas kami, atau bahkan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang kami terapkan sudah sesuai dengan pedoman yang lebih besar. Selain itu, dukungan dalam hal pembenahan fasilitas umum, seperti jalur evakuasi akan sangat membantu.” (Budi Karyono, wawancara, 26/11/2024)

Dalam wawancara dengan Pak Budi Karyono, ketua Pokdarwis, beliau menyampaikan bahwa meskipun pengelola sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan keselamatan pengunjung, mereka merasa kurang mendapat dukungan dari pemerintah terkait perlindungan pengunjung. Pak Budi menyoroti pentingnya perbuatan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang lebih jelas dan pelatihan keselamatan untuk petugas wisata. Beliau juga menyarankan perlunya pengawasan berkala dan perbaikan infrastruktur, seperti jalur evakuasi, untuk meningkatkan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengelola berusaha keras, keberhasilan dalam mengoptimalkan perlindungan pengunjung masih terbatas tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah.

Setelah melakukan wawancara dengan organisasi Kelompok Sadar Wisata, peneliti melanjutkan wawancara langsung kepada pemerintah Kalurahan Tirtomartani. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi

mengenai perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam perbuatan perlindungan pengunjung desa wisata umbul Sidomulyo berikut kutipan wawancara yang disampaikan Pak Bkti Susanto S. Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani, berikut pernyataannya:

“Kami mengakui bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal kerjasama antara pemerintah dan pengelola destinasi wisata. Kami memahami bahwa peran serta pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kapasitas perlindungan di lapangan. Kedepannya, kami akan lebih aktif dalam memberikan bantuan teknis dan anggaran untuk pengelolaan fasilitas keselamatan di lokasi wisata. Kami juga akan memperkuat program pelatihan bagi pengelola dan petugas yang terlibat langsung dengan pengunjung, agar mereka lebih siap dalam menangani keadaan darurat atau situasi yang berisiko.” (Bkti Susanto, S. Si, wawancara 03/12/2024).

Hasil wawancara dengan Pak Bkti Susanto, Carik Kalurahan Tirtomartani, mengakui adanya kekurangan dalam kerjasama antara pemerintah dan pengelola wisata terkait perlindungan pengunjung di Wisata Umbul Sidomulyo. Beliau menekankan bahwa peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kapasitas perlindungan, dan pemerintah akan lebih aktif memberikan bantuan teknis serta anggaran untuk pengelolaan fasilitas keselamatan. Selain itu, Pak Bkti juga menyebutkan pentingnya program pelatihan bagi pengelola dan petugas untuk mempersiapkan mereka menghadapi situasi darurat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan menyadari kekurangan dalam perlindungan pengunjung dan berkomitmen untuk meningkatkan peranannya dalam mendukung pengelola wisata demi keselamatan pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, temuan menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan Tirtomartani belum menunjukkan adanya perbuatan yang pasti dalam hal perlindungan pengunjung desa wisata Umbul Sidomulyo. Hal ini terlihat dari keterangan yang diberikan oleh Pak Budi Karyono, yang menyatakan bahwa pengelola wisata harus bekerja keras untuk memastikan keselamatan pengunjung meskipun tanpa bantuan regulasi atau dukungan konkret dari pemerintah. Pengelola wisata hanya mengandalkan fasilitas

dasar seperti kotak P3K dan pengawasan oleh petugas secara mandiri. Meskipun ada upaya perlindungan yang dilakukan oleh pengelola wisata, seperti pengawasan terhadap anak-anak yang berenang di kolam dewasa dan penyediaan tempat penyimpanan barang, ini sangat bergantung pada inisiatif dari Pokdarwis, Namun, meskipun ada beberapa tindakan perlindungan yang dilakukan secara mandiri oleh Pokdarwis, masih ada kekurangan dalam hal perbuatan pemerintah. Pak Bakti Susanto dari pihak pemerintah mengakui adanya ruang untuk perbaikan, menyatakan bahwa pemerintah kalurahan akan lebih aktif memberikan bantuan teknis, anggaran, dan pelatihan kepada pengelola dan petugas wisata untuk meningkatkan kapasitas perlindungan di lapangan. Temuan di lapangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan dari pihak Pokdarwis, perlu adanya perbuatan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang lebih sistematis dan tegas masih sangat terbatas.

F. Pengawasan dan Kontrol terhadap Desa Wisata

Untuk menggali lebih dalam mengenai pengawasan dan kontrol pemerintah desa Kalurahan Tirtomartani, peneliti mengarahkan pertanyaan kepada Pak Budi Karyono terkait apakah keterlibatan pemerintah Kalurahan diperlukan untuk mendukung pengelolaan desa wisata, baik dalam bentuk regulasi, pendampingan administratif, maupun koordinasi dengan pihak-pihak lain. Berikut pernyataan Pak Budi terkait perlunya kepengurusan pemerintah kalurahan:

“Berbicara tentang wilayah desa tentunya sedikit banyak kami memerlukan keterlibatan pemerintah dalam membangun usaha mas, terlebih lagi mengenai surat izin dan lain sebagainya, karena desa wisata umbul sidomulyo ini sebagian tanahnya menggunakan tanah Kasultanan Ground sampai sekarang untuk legalitas desa wisata ini masih belum memiliki surat izin resmi penggunaan lahan kaslutanan dari panitikesmo.” (Budi Karyono, wawancara tanggal 26/11/2024)

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun Desa Wisata Umbul Sidomulyo dibangun dengan inisiatif masyarakat, terdapat kebutuhan yang mendesak akan pengawasan dan kontrol pemerintah Kalurahan Tirtomartani,

khususnya dalam aspek legalitas desa wisata. Pak Budi Karyono menyebutkan bahwa sebagian lahan yang digunakan oleh Desa Wisata Umbul Sidomulyo merupakan tanah Kasultanan Ground, yang hingga saat ini belum memiliki surat izin resmi dari Panitikismo, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah kasultanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan desa wisata dapat terhambat apabila aspek legalitas penggunaan lahan tidak segera diselesaikan. Mengenai permasalahan legalitas desa wisata ini Peneliti kembali meninjau permasalahan legalitas desa wisata ini, dengan tujuan untuk mengetahui apakah pemerintah kalurahan sudah melakukan upaya atau pergerakan signifikan dalam mengawas dan kontrol desa wisata. Berikut pernyataan dari Pak Budi terkait pengurusan legalitas desa wisata dari pemerintah Kalurahan Tirtomartani:

“Selama ini setelah desa wisata ini beroperasi kurang lebih 5 tahun pemerintah minim dalam kepengurusannya mas, padahal kami tidak banyak minta kepada mereka jangankan ikut mengurus yang seharusnya mereka sebagai pelindung kami, mengenai izin penggunaan lahan kasultanan belum ada kejelasan sampai sekarang.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Priyanto selaku Bendahara desa wisata Umbul Sidomulyo, berikut pernyataannya:

“Untuk pengawasan desa wisata mungkin kami kebanyakan kelola sendiri untuk pemasukkan pengeluaran dan lain sebagainya, kami juga saling mengawasi ada laporan keuangan dan lain sebagainya setiap hari dan setiap minggu , masyarakat (Pokdarwis) saling mengawasi saja.” (Priyanto, wawancara, 01/12/2024).

Terkait minimnya pengawasan dari Pemerintah Kalurahan dalam mengurus desa wisata usaha juga disampaikan oleh Pak Danang Catur Wijara selaku seksi keamanan Desa wisata Umbul Sidomulyo, berikut pernyataannya:

“Iya mas pemerintah kalurahan sebenarnya sebagai pelindung terlalu lama mengurus legalitas penggunaan lahan Kasultanan Ground bahkan kami mempunyai inisiatif sendiri untuk turun mengurus izin tetapi harus melalui Kalurahan Tirtomartani tidak bisa dilakukan oleh kami harus melalui pemerintah kalurahan ya kebanyakan kami lakukan sendiri urusan desa wisata ini mas.” (Danang Catur Wijara, wawancara, 27/11/2024).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata di Kalurahan Tirtomartani, dapat dianalisis bahwa terdapat permasalahan signifikan terkait pengawasan dan kontrol pemerintah kalurahan dalam pengurusan desa wisata umbul sidomulyo . Pernyataan Pak Budi, Ketua Pokdarwis desa wisata Umbul Sidomulyo, menunjukkan bahwa meskipun desa wisata telah beroperasi selama lima tahun, pemerintah kalurahan masih belum memberikan perhatian yang cukup terhadap pengurusan desa wisata. Meski masyarakat desa wisata sudah berusaha mandiri dalam pengelolaan, mereka tetap mengharapkan bantuan pemerintah dalam hal legalitas lahan yang menjadi masalah utama. Hal ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pihak pemerintah kalurahan dan masyarakat setempat dalam keberlangsungan desa wisata.

Terkait hal tersebut, peneliti kembali mengulas kontribusi yang telah diberikan oleh pemerintah selama berdirinya desa wisata Umbul Sidomulyo, terutama dalam hal kebijakan, pemberian dana, dan pengawasan yang mendukung keberlanjutan desa wisata ini.

“Untuk kebijakan sampai sekarang sih tidak ada mas, megurus izin lahan saja belum beres-beres, kami disini masyarakat rt 08 bisa mngurus desa wisata ini sendiri sudah jelas semua juga dibantu dengan penugasan masing masing di struktur organisasi (Danang Catur wijara, wawancara, 26/11/2024).

Hal serupa juga sampaikan Pak Priyanto selaku Bendahara Desa wisata Umbul Sidomulyo, berikut pernyataannya:

“Tidak ada peraturan dan pengawasan yang khusus sih mas untuk kami, karena kami juga memiliki aturan sendiri, penghasilan juga kami urus sendiri tidak terlalu memerlukan dana kalurahan, yang ada Pak Budi setor uang bulanan ke kalurahan, kadang juga kalau mereka buat kegiatan malah mereka mengajukan proposal anggaran dana kepada kami” (Bapak Priyanto, wawancara, 01/12/2024).

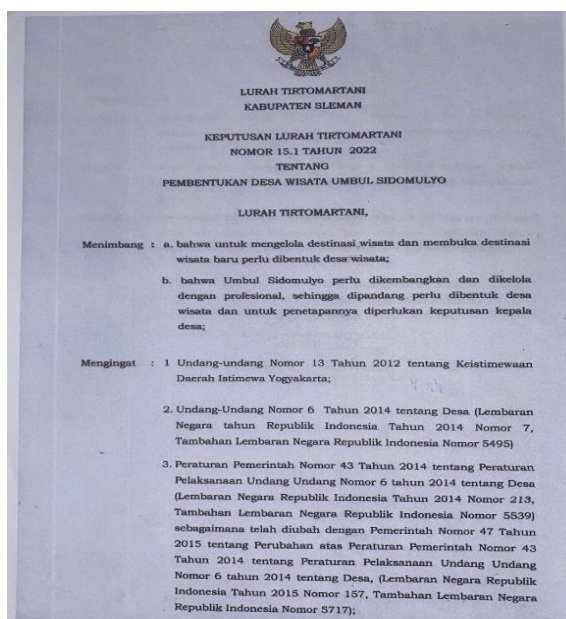
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Danang Catur Wijara dan Pak Priyanto, keduanya menjelaskan bahwa pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum berkontribusi menggunakan kewenangannya dalam mengawasi dan mengelola desa wisata. meskipun mereka belum menerima pengawasan atau kebijakan yang jelas dari pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan minimnya perbuatan pemerintah dalam mengawas dan mengontrol pengelolaan desa wisata. Pak Priyanto juga menegaskan bahwa tidak ada peraturan atau kebijakan khusus dari pemerintah kalurahan yang mengatur desa wisata, dan mereka lebih banyak mengatur pengelolaan dan penghasilan mereka sendiri.

Setelah melakukan wawancara dengan organisasi Kelompok Sadar Wisata, peneliti melanjutkan wawancara langsung kepada pemerintah Kalurahan Tirtomartani. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai perbuatan pemerintah kalurahan Tirtomartani dalam mengawasi serta pengurusan desa wisata Umbul Sidomulyo. Wawancara tersebut berfokus pada pemahaman tentang berbagai masalah yang dihadapi, upaya yang telah dilakukan, serta strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan dalam menjaga keberlanjutan desa wisata tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh wawasan lebih dalam mengenai sejauh mana perbuatan pemerintah dalam mengawasi kemajuan desa wisata tersebut. Peneliti menanyakan apa saja pengawasan dari pemerintah Kalurahan terhadap desa wisata Umbul Sidomulyo, berikut kutipan wawancara yang disampaikan Pak Bkti Susanto S. Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani, berikut pernyataannya:

“Untuk desa wisata ini dari pemerintah kami lebih ke memberikan dukungan saja, yang pertama kami sudah menetapkan umbul sidomulyo sebagai desa wisata pada tahun 2022 melalui surat keputusan Kalurahan Tirtomartani, yang kedua ada juga Pembangunan infrastruktur jalan melalui bantuan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kalurahan tetapi lebih dominan ke dana swadaya masyarakat yang digarap menggunakan dana mereka sendiri yang ketiga kami juga ada memberikan bantuan untuk pengamanan Sungai berupa bronjong-bronjong batu agar tidak longsor.” (Bkti Susanto, S. Si wawancara 03/12/2024).

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Pak Bkti Susanto memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Kalurahan Tirtomartani untuk mendukung keberlanjutan dan pengawasan desa wisata Umbul Sidomulyo. Pertama, penetapan Umbul Sidomulyo sebagai desa wisata pada tahun 2022 melalui surat keputusan Kalurahan Tirtomartani menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakui dan memfasilitasi pengembangan sektor wisata di wilayah tersebut. Penetapan ini menjadi landasan hukum yang sah bagi segala upaya pengelolaan dan pengembangan desa wisata, sekaligus menandai adanya pengakuan resmi terhadap potensi wisata yang dimiliki. Kedua, terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan merupakan dukungan pemerintah kabupaten dan kalurahan memberikan dukungan yang signifikan melalui bantuan dana untuk perbaikan jalan. Namun, yang patut dicatat adalah kontribusi besar masyarakat setempat dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek tersebut, melalui dana swadaya masyarakat. ketiga, upaya pengamanan sungai dengan pembangunan bronjong batu untuk mencegah longsor mencerminkan perhatian pemerintah terhadap aspek keberlanjutan lingkungan.

Gambar 3. 6 Surat Keputusan Lurah Tirtomartani



Sumberdata: Kalurahan Tirtomartani

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, dan Kalurahan Tirtomartani secara resmi memberikan pengawasan sebagai bentuk dukungan terhadap Desa Wisata Umbul Sidomulyo melalui surat izin dan keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak. Lurah Tirtomartani menetapkan Umbul Sidomulyo sebagai wisata rintisan, yang selaras dengan Surat Keputusan Lurah Tirtomartani Nomor 15.1 Tahun 2022. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah kalurahan dalam mendorong pembentukan dan pengembangan Desa Wisata tersebut.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk menggali informasi lebih dalam terkait kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam pengelolaan sumber daya bersama, khususnya mengenai pengurusan legalitas penggunaan lahan Kasultanan Ground untuk pengembangan desa wisata Umbul Sidomulyo. Dalam wawancara ini, peneliti bertujuan untuk memahami sejauh mana perbuatan pemerintah kalurahan memanfaatkan kewenangannya dalam mengelola dan mengatur sumber daya alam dan melindungi desa wisata yang ada sesuai UU no 6 tahun 2014, serta bagaimana proses pengurusan legalitas penggunaan tanah. Melalui wawancara ini, peneliti mendapat jawaban dari Pak Bkti Susanto S.Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani, berikut pernyataannya:

“Mengenai kebijakan belum ada yang kami berikan untuk desa wisata umbul sidomulyo, karena kami belum berkolaborasi dan belum bergabung dalam kepengurusan desa wisata ini, namun untuk perizinan legalitas penggunaan lahan kasultanan yang digunakan belum ada tindak lanjut dalam pengurusannya, tetapi kami sudah melakukan pengajuan terkait permohonan pemanfaatan tanah itu masih dalam proses, sampai sekarang belum ada kelanjutan, sekalipun mereka ada akte notaris terkait legalitas usaha Pokdarwis, tetapi untuk kedinasan itu memang harus melalui pemerintah Kalurahan, masih menunggu rapat tata ruang dari Badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman dan berkas dikirim ke Panitikesmo.” (Bkti Ssuanto, wawancara 03/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bkti Susanto S.Si, selaku Carik Kalurahan Tirtomartani, terungkap bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan atau

pengurusan yang jelas dari pemerintah Kalurahan terkait pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Meskipun sudah ada upaya yang dilakukan untuk memperoleh legalitas penggunaan lahan Kasultanan Ground, seperti pengajuan izin, proses perizinan tersebut masih belum selesai meskipun desa wisata telah berdiri selama lima tahun. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan lambatnya respons administratif yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan. Sangat penting untuk menegaskan bahwa pemerintah Kalurahan Tirtomartani perlu segera mengambil langkah konkret dalam mengawasi dan mengontrol dan memberikan kebijakan yang jelas terkait pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Perbuatan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani sangat diperlukan mengingat Kalurahan sebagai pelindung dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengontrol dan mengawasi pemanfaatan sumber daya di wilayah mereka, termasuk dalam hal pengelolaan desa wisata. Dengan tidak adanya kebijakan yang memadai, keberlanjutan desa wisata ini dapat terancam, karena pengelolaan yang tidak sah atau tidak terstruktur dapat menghambat perkembangan serta mengurangi potensi manfaat bagi masyarakat setempat. Perbuatan pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam mengurus legalitas dan regulasi desa wisata sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung pengelolaan yang berkelanjutan. Proses perizinan yang tertunda menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan harus mempercepat prosedur yang diperlukan, bekerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman, dan memastikan bahwa seluruh aspek administratif berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan legalitas lahan ini juga disampaikan oleh Muhari, SH. Selaku Adyatama Dinas Pariwisata Sleman dalam wawancara ia menyampaikan bahwa:

"Desa wisata dihadirkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar, desa wisata umbul sidomulyo ini memang di bangun diatas tanah Sultan Ground yang diperbolehkan oleh Kalurahan Tirtomartani untuk di pergunakan. Legalitas desa wisata ini terkendala karena adanya perubahan Peraturan gubernur yang terbaru nomor 24 tahun 2024 penggunaan tanah yang baru di perbarui dan para pengelola desa wisata baru melengkapi dokumen

dokumen yang diperlukan untuk memenuhi izin penggunaan tanah kas desa untuk kegiatan kemasyarakatan". (Muhari, SH. wawancara 12/12/2024)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Wisata Umbul Sidomulyo menghadapi kendala utama yang terkait dengan legalitas, yang menghambat perkembangan usaha ini. Masalah utama adalah status tanah yang digunakan, yang berada di atas tanah Kesultanan Gron tanpa izin resmi dan belum ada tindak lanjut dari pemerintah dikarenakan adanya perubahan peraturan Gubernur dan masih dalam proses legalitas melengkapi dokumen, serta penggunaan sumber mata air dari Kalurahan Tamanmartani yang belum memiliki izin. Selain itu, usaha ini belum memiliki izin resmi terkait pemungutan biaya tiket dari pengunjung, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan desa wisata untuk keberlanjutan. Proses pengurusan legalitas yang masih berlangsung tanpa tindak lanjut yang jelas dari pihak pemerintah Kalurahan sehingga menjadi hambatan.

Setelah melakukan wawancara terkait legalitas lahan Kasultanan Ground dan kebijakan yang berlaku, peneliti melanjutkan dengan menanyakan apakah masih terdapat kendala atau pengurusan lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam memastikan keberlanjutan Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Dalam wawancara tersebut, Pak Bakti Susanto selaku Carik Kalurahan Tirtomartani memberikan penjelasan terkait berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah kalurahan kedepannya untuk dan mengurus keberlanjutan desa wisata tersebut, berikut pernyataannya:

“Kami juga masih banyak yang harus diurus mengenai desa wisata umbul sidomulyo ini bisa dikatakan belum resmi, belum memiliki izin juga ke pemerintah daerah terkait pemungutan uang loket tiket masuk, selanjutnya mata air yang digunakan atau diambil untuk desa wisata ini milik kalurahan sebelah bukan Kalurahan Tirtomartani, melainkan Kalurahan Tamanmartani sampai sekarang hanya tau sama tau dan didiamkan saja semoga tidak apa-apa mungkin kedepannya akan resmi dengan pengurusan lebih lanjut hal ini yang menyebabkan kami belum bisa berkolaborasi dan belum bisa mengawasi dan mengotnrol desa wisata ini mungkin kedepannya jika sudah resmi akan kami jadikan Bumdes agar kepengurusannya lebih transparan.” (Bakti Susanto, S. Si, wawancara 03/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kalurahan belum dapat mengawasi dan mengontrol desa wisata secara signifikan karena desa wisata tersebut dibangun oleh swadaya masyarakat dan statusnya belum resmi. Banyak urusan terkait izin usaha yang masih bersifat ilegal, seperti pengelolaan tiket masuk dan pemanfaatan sumber mata air yang merupakan milik kalurahan lain, yaitu Kalurahan Tamanmartani. Ketidakjelasan ini berdampak pada terbatasnya hak pemerintah untuk kolaborasi antara pemerintah kalurahan Tirtomartani dan pengelola desa wisata. Bakti Susanto juga menyampaikan bahwa pemerintah kalurahan masih dalam proses kepengurusan izin desa wisata dan akan dikelola melalui mekanisme Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar lebih transparan dan terorganisir.

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum mampu melaksanakan pengawasan dan kontrol secara optimal terhadap Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa desa wisata tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan belum memiliki status legal yang resmi. Banyak perizinan usaha yang masih bersifat ilegal, seperti pengelolaan tiket masuk penggunaan tanah kasultanan dan pemanfaatan sumber mata air yang berada di wilayah Kalurahan Tamanmartani. Kondisi ini membatasi hak dan peran pemerintah kalurahan untuk mengontrol dan berkolaborasi dengan pengelola desa wisata. Bakti Susanto selaku carik kalurahan juga menegaskan bahwa pemerintah kalurahan saat ini masih dalam proses mengurus legalitas desa wisata agar nantinya dapat dikelola melalui mekanisme Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan terorganisir, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam pengawasan dan kontrol.

G. Dampak Desa Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap Kemakmuran Warga

Pembangunan yang dilakukan di suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, Desa Wisata Umbul Sidomulyo dikelola oleh masyarakat sekitar, di mana seluruh pekerjanya juga berasal dari masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan sekaligus

merasakan manfaatnya. Dalam pengelolaan Umbul Sidomulyo, masyarakat dilibatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka turut serta dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil usaha tersebut. Kalurahan Tirtomartani, khususnya di Dusun Brintikan, memiliki Desa Wisata Umbul Sidomulyo yang didirikan atas inisiatif masyarakat setempat. Usaha ini memberikan manfaat besar bagi warga sekitar, terutama sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat lokal. Selain itu, keberadaan Umbul Sidomulyo bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan perekonomian warga di sekitarnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan Dwi Suryanti, salah satu warga setempat sekaligus pelaku UMKM di Umbul Sidomulyo:

"Dengan adanya Desa Wisata ini sangat membantu saya karena dulunya saya buruh pabrik, keluar tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai ibu rumah tangga. Berkat adanya wisata ini, saya bisa membuka lapak di sini. Lumayan membantu, Mas, pendapatan per minggu bisa mencapai jutaan kotor, cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari." (Dwi Suryanti, wawancara 27/11/2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar Umbul Sidomulyo merasakan manfaat langsung dari keberadaan Desa Wisata tersebut. Keberadaan Umbul Sidomulyo memberikan peluang ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Salah satu contohnya adalah Dwi Suryanti, yang memanfaatkan keberadaan wisata ini untuk membuka usaha UMKM. Pendapatan yang diperoleh dari usahanya tidak hanya membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa Umbul Sidomulyo berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Bu Titin selaku masyarakat lokal dan Pelaku UMKM:

"Terus terang sangat membantu, adanya wisata ini membuat perekonomian saya menjadi lebih baik. Banyak juga yang meninggalkan pekerjaan sebagai buruh tani. Pendapatan saya per minggu bisa lebih dari 1 juta, tergantung ramainya pengunjung." (Titin, wawancara 27/11/2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar Umbul Sidomulyo mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan berkat keberadaan Desa Wisata tersebut. Kesempatan untuk beralih dari pekerjaan tradisional, seperti buruh tani, ke aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berorientasi pasar, menunjukkan adanya diversifikasi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh, yang mencapai lebih dari 1 juta per minggu, mencerminkan dampak positif wisata terhadap kesejahteraan ekonomi dan kemakmuran warga setempat.

Gambar 3. 7 Lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Umbul Sidomulyo



Sumber: Dokumentasi peneliti, 01 Desember 2024

Selain pelaku UMKM usaha ini juga memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar sebagai pengelola wisata. Dibawah ini hasil wawancara peneliti dengan Danang Catur Wijara salah satu pengelola lahan parkir dan seksi keamanan di Umbul Sidomulyo:

"Jujur, kalau buat saya pribadi, saya sangat terbantu dengan adanya Umbul ini. Perekonomian saya meningkat. Yang dulunya saya hanya seorang kuli, sekarang saya bisa memiliki pendapatan per minggu. Penghasilan saya lumayan dibanding yang dulu, bahkan di atas UMP per bulan. Selain itu, adanya kepemilikan saham yang dibagikan per tahun juga membantu. Besar saham disesuaikan dengan kontribusi di awal pembangunan, dan semuanya diatur dalam AD/ART." (Danang Catur Wijara, wawancara 27/11/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar Umbul Sidomulyo merasakan peningkatan ekonomi yang signifikan sejak keberadaan Desa Wisata tersebut. Peralihan dari pekerjaan kasar seperti buruh/kuli

menjadi pelaku usaha dengan pendapatan yang stabil menunjukkan bahwa Umbul Sidomulyo menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih baik. Pendapatan mingguan yang melebihi UMP bulanan menjadi bukti konkret peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, sistem kepemilikan saham yang disesuaikan dengan kontribusi awal pembangunan, serta pengaturan melalui AD/ART, mencerminkan adanya manajemen yang profesional dan transparan. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga memberikan rasa kepemilikan kepada masyarakat, sehingga memperkuat komitmen mereka terhadap keberlangsungan Umbul Sidomulyo. Selain itu manfaat dari Desa Wisata ini dirasakan Muhammad Aidi F selaku pemuda setempat yang bekerja membantu menjaga lahan parkir.

"Usaha ini sangat membantu saya, Mas. Waktunya juga lebih fleksibel. Kalau untuk kami, kapan ada waktu untuk jaga parkir, kami bisa datang ke sini kalau waktu kosong. Nanti kami digaji per jam, diberi per hari. Lumayan membantu saya sebagai pelajar, sudah memiliki penghasilan untuk jajan." (Muhammad Aidi F, wawancara 01/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Desa Wisata Umbul Sidomulyo memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, termasuk bagi pelajar. Adanya sistem kerja yang fleksibel memungkinkan pelajar untuk mengatur waktu antara belajar dan bekerja, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengganggu kegiatan utama mereka. Pendapatan yang diterima berdasarkan jam kerja juga memberi keleluasaan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal pribadi, seperti waktu luang atau kosong. Hal senada disampaikan berdasarkan hasil wawancara dengan Andika Rangga Saputra pemuda RT 08 / penjaga lahan parkir dan kebersihan kolam menyampaikan:

"Ya, kalau saya merasa nyaman kerjanya bareng teman warga sekitar. Kalau ada waktu luang, saya ke sini ikut jaga lahan parkir, sorenya saya ikut bersihin kolam. Penghasilan lumayan, untuk seumur saya sangat mencukupi dan membantu." (Andika Rangga, wawancara 01/12/2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar Umbul Sidomulyo merasa nyaman bekerja bersama teman-teman dan warga setempat. Lingkungan kerja yang kekeluargaan dan fleksibilitas waktu memungkinkan mereka untuk bekerja saat ada waktu luang, seperti menjaga parkir

atau membersihkan kolam. Penghasilan yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan bagi yang bekerja paruh waktu. Dampak sosialnya, Desa Wisata ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mempererat solidaritas sosial antarwarga. Keterlibatan langsung dalam pengelolaan memberi masyarakat rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, serta mengurangi ketergantungan pada pekerjaan tradisional, menciptakan perubahan sosial yang positif dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Manfaat sosial dan ekonomi juga dirasakan Yoga Ikbal Prasetya selaku penjaga loket wisata berdasarkan hasil wawancara ia menyampaikan:

"Sejak adanya Umbul ini, saya banyak merasakan perubahan perekonomian. Sebelumnya, saya kerja ikut orang dengan pendapatan yang tidak menentu, bahkan di bawah UMP. Alhamdulillah, dengan adanya Umbul ini, kami bisa dikatakan Dusun mandiri karena rata-rata pendapatan kami berasal dari wisata ini. Desa Wisata sangat membantu perekonomian saya meningkat." (Yoga Ikbal Prasetya, wawancara 01/12/2024).

Berdasarkan kutipan wawancara ini, dapat dilihat bahwa Umbul Sidomulyo telah memberikan dampak positif pada perekonomian individu masyarakat. Yoga Ikbal Prasetya menggambarkan perubahan signifikan dalam pendapatannya setelah adanya Desa Wisata ini. Sebelumnya bekerja dengan pendapatan tidak tetap, kini ia memiliki sumber penghasilan yang lebih stabil dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata ini telah berhasil membuka lapangan pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan mendukung kemandirian ekonomi di Dusun Brintikan. Dampak-dampak ekonomi tersebut juga ditegaskan dalam hasil wawancara dengan Pak Budi karyono selaku Ketua sekaligus pemodal awal Desa Wisata ini.

"Memang target awal pembangunan Umbul ini saya lakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Makanya saya harapkan 100% yang bekerja di sini adalah masyarakat sekitar. Saya bukan sekadar membuka lapak jualan; saat ini ada 22 lapak, dan saya masih ingin menambah lagi ke depannya. Selain itu, ada AD/ART yang mengatur pembagian saham untuk 53 kartu keluarga yang dibagikan per tahun sesuai dengan kontribusi awal. Kami juga menyisihkan 1 saham untuk dana abadi umat, digunakan untuk biaya pemakaman (kenduri) bagi masyarakat sekitar, serta untuk beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan." (Budi Karyono, wawancara 26/11/ 2024).

Berdasarkan hasil wawancara pernyataan Budi Karyono menegaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan Umbul Sidomulyo adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dengan memastikan bahwa 100% tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar, Umbul Sidomulyo secara langsung mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, adanya pembagian saham dan dana abadi umat untuk kepentingan sosial seperti biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan memperlihatkan komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang. Pembagian ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan terhadap keberhasilan usaha wisata. Hal ini juga senada dan ditegaskan berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Bkti Susanto, S.Si selaku Carik Kalurahan Tirtomartani.

"Umbul Sidomulyo memang dari swadaya masyarakat. Sekarang, dapat dilihat bahwa usaha ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga. Warga yang dulunya tidak memiliki pekerjaan kini memiliki pekerjaan, bisa berdagang, dan mengelola wisata. Pendapatan mereka sudah cukup lumayan. Dari hasil ini, banyak hal yang sudah membantu, seperti perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, Kalurahan, dan dana masyarakat sekitar." (Bkti Susanto, S.Si, wawancara 03/12/2024).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bkti Susanto, dapat dilihat bahwa Umbul Sidomulyo telah mendorong perekonomian masyarakat setempat secara signifikan. Desa Wisata ini tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk berdagang dan mengelola wisata. Peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat dari usaha ini turut memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Lebih lanjut, dampak sosial yang ditimbulkan juga terlihat pada perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana yang lebih baik, yang berasal dari dana pemerintah pusat, Kalurahan, dan kontribusi masyarakat setempat. Dengan demikian, Desa Wisata ini telah berhasil mendorong perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat, memperkuat kemandirian dan solidaritas di antara warga, serta

mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka.

Gambar 3. 8 Kondisi jalan masuk dan keluar Desa Wisata Umbul Sidomulyo



Sumber: Dokumentasi peneliti, 01 Desember 2024

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara temuan di lapangan menunjukkan Desa Wisata Umbul Sidomulyo dapat disimpulkan bahwa usaha ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Sebelumnya, banyak warga yang bekerja sebagai buruh atau tidak memiliki pekerjaan tetap, namun dengan adanya Desa Wisata ini, mereka memiliki peluang untuk membuka usaha atau bekerja di sektor wisata dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi dan stabil dibandingkan sebelumnya. Pendapatan yang diperoleh pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan bahkan melebihi UMP. Selain dampak ekonomi, Desa Wisata ini juga mempererat solidaritas sosial di antara warga. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan usaha serta adanya pembagian saham memberikan rasa kepemilikan yang kuat, yang meningkatkan komitmen dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha. Sistem pengelolaan yang transparan melalui peraturan yang jelas (AD/ART) semakin memperkuat hubungan sosial di antara warga. Dampak sosial yang ditimbulkan juga terlihat pada perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana di desa. Peningkatan pendapatan masyarakat turut mendorong perbaikan fasilitas umum seperti jalan dan sarana prasarana lainnya, yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran warga secara keseluruhan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan “Pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo” sebagai berikut:

Desa Wisata Umbul Sidomulyo terbentuk dari inisiatif masyarakat RT 08 Dusun Brintikan sebagai respons atas krisis ekonomi yang melanda selama pandemi COVID-19. Dengan prinsip Gotong Royong, masyarakat memanfaatkan potensi lokal seperti mata air secara kolektif untuk menciptakan sumber penghidupan baru. Kesatuan masyarakat di kalurahan Tirtomartani adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan sebagai penggerak utama, mengoordinasikan upaya masyarakat melalui musyawarah dan gotong royong. Proses ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas luar biasa dalam mengorganisasi dan memanfaatkan sumber daya bersama secara berkelanjutan, meskipun tanpa dukungan pemerintah pada tahap awal pembentukan, Swadaya masyarakat mampu mengurus secara mandiri dan desa wisata berdampak positif dalam perekonomian dan sosial. Namun adapun sebagian yang perlu diperhatikan Governing Pemerintah Kalurahan Tirtomartani dalam pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Sesuai dengan focus penelitian yang diteliti yaitu;

1. Pelayanan desa wisata, Pemerintah Kalurahan Tirtomartani menunjukkan keterbatasan dalam memberikan dukungan kepada Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Seluruh aspek pengelolaan dan pelayanan sepenuhnya ditangani oleh Pokdarwis tanpa dukungan administratif, legalitas, maupun operasional yang memadai dari pemerintah. Hal ini menunjukkan kegagalan Perbuatan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pengelola utama tata kelola desa wisata yang terintegrasi.
2. Sumber dana desa wisata, Pendanaan pembangunan Desa Wisata Umbul Sidomulyo sebagian besar bersumber dari swadaya masyarakat, terutama

dari kontribusi Bapak Budi Karyono yang secara rutin menyisihkan dana pribadi. Minimnya kontribusi dari perbuatan pemerintah kalurahan bahkan berbanding terbalik dengan kewajiban, perbuatan pemerintah kalurahan malah mengambil keuntungan kepada Pokdarwis yang memberikan iuran bulanan kepada pemerintah tanpa transparansi penggunaan dana tersebut. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas pemerintah.

3. Pemberdayaan Pokdarwis, Perbuatan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum menyediakan program pemberdayaan yang konkret bagi Pokdarwis. Pelatihan dan pembinaan lebih banyak berasal dari inisiatif eksternal atau usaha mandiri anggota Pokdarwis, khususnya Bapak Budi Karyono yang memegang peranan sentral dalam pemberdayaan komunitas.
4. Perlindungan pengunjung, Upaya perlindungan terhadap pengunjung Desa Wisata Umbul Sidomulyo masih sangat terbatas dan sepenuhnya bergantung pada inisiatif Pokdarwis. Perbuatan pemerintah kalurahan belum memberikan bantuan teknis, regulasi, atau anggaran yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengunjung.
5. Pengawasan dan Legalitas, Perbuatan pemerintah Kalurahan Tirtomartani belum mampu melaksanakan pengawasan dan kontrol secara optimal karena Desa Wisata Umbul Sidomulyo belum memiliki status legal resmi. Upaya legalisasi melalui mekanisme Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sedang dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan terorganisir.
6. Dampak Desa Wisata terhadap Kemakmuran Warga Desa Wisata Umbul Sidomulyo memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat. Banyak warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap kini memiliki pendapatan stabil dari sektor pariwisata, bahkan melampaui UMP. Selain itu, desa wisata ini mempererat solidaritas sosial melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang transparan dan berbagi hasil yang

adil. Dampak positif lainnya terlihat pada peningkatan infrastruktur desa, yang turut mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

Secara keseluruhan, meskipun Desa Wisata Umbul Sidomulyo telah memberikan dampak positif terhadap kemakmuran warga, perbuatan pemerintah Kalurahan Tirtomartani masih sangat terbatas. Diperlukan peningkatan dukungan pemerintah dalam aspek pelayanan, pendanaan, pemberdayaan, perlindungan, dan pengawasan untuk menjamin keberlanjutan dan kemajuan desa wisata ini.

B. Saran

1. Peningkatan Peran Pemerintah dalam Pelayanan Desa Wisata Pemerintah Kalurahan Tirtomartani harus lebih proaktif dalam memberikan dukungan administratif, legalitas, dan operasional terhadap pengelolaan Desa Wisata Umbul Sidomulyo. Ini dapat dilakukan dengan membentuk unit khusus di tingkat kalurahan yang bertanggung jawab atas pengembangan desa wisata serta memastikan Pokdarwis mendapatkan akses ke regulasi yang jelas, bantuan teknis, dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana, Pemerintah Kalurahan harus menghentikan praktik pengambilan iuran dari Pokdarwis, Sebagai gantinya, perlu ada mekanisme yang jelas terkait penggunaan dana, termasuk laporan keuangan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu mencari sumber pendanaan tambahan melalui dana desa untuk mendukung pengembangan wisata Umbul Sidomulyo untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Kalurahan Tirtomartani harus menginisiasi program pemberdayaan Pokdarwis yang berkelanjutan, seperti pelatihan manajemen wisata, pemasaran digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah harus menjalin kemitraan dengan dinas terkait, akademisi, dan lembaga swasta untuk memberikan akses lebih luas terhadap pelatihan dan pendampingan teknis bagi Pokdarwis.

4. Pemerintah Kalurahan Tirtomartani harus berperan dalam menciptakan regulasi terkait standar keselamatan bagi pengunjung desa wisata. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas keamanan, pemasangan rambu peringatan, serta memastikan adanya petugas keselamatan yang dapat bertindak dalam keadaan darurat.
5. Percepatan Legalitas Desa Wisata melalui Peran Pemerintah Pemerintah Kalurahan harus segera mengurus legalitas Desa Wisata Umbul Sidomulyo agar memiliki status hukum yang sah, misalnya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau bentuk badan hukum lainnya. Dengan adanya status hukum yang jelas, desa wisata akan memiliki akses lebih besar ke program pemerintah, bantuan dana, serta kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Ariantika, I. G. N. S., Jumail, M., & Murianto, M. (2022). *Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok*. *Journal Of Responsible Tourism*, 2(1), 01-10.
- Husni, A., & Safaat, S. (2019). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan*. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 1-17.
- Kurniawan, F. H., & Maulana, M. A. (2022). *Model Strategi Pengembangan Masyarakat Berbasis Desa Wisata di Situ Gunung Sukabumi*. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 219-236.
- Mahanani, Y. P., & Listyorini, H. (2021, December). *Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di Desa Wisata cempaka, bumijawa, kabupaten tegal*. In *Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* (Vol. 1, No. 2, pp. 152-164).
- Marsela, A. S., & Wijaya, A. (2020). *Dampak Pengembangan Objek Wisata Goa Kreo Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nurhajati, N. (2018). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (studi di desa mulyosari kecamatan pagerwojo kabupaten tulungagung)*. *Publiciana*, 11(1), 1-13.
- Ostrom. 1990. *Governing The Commons; The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York. Cambridge University Press.
- Ramdani, Z., & Karyani, T. (2020). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan agrowisata dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat (Studi kasus pada agrowisata Kampung Flory, Sleman, Yogyakarta)*. *MIMBAR AGRIBISNIS: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 675-689.
- Salsabila, M. S., & Fauzi, A. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Menang Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Pariwisata Terapan* Vol, 5(1).
- Simamora, Rotuna Kristin dan Rudi Salam Sinaga. *Peran Pemerintah Daerah Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli*

Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Volume 4, Nomor 1, 2016.

Syah, F. (2020). *Pariwisata Sebagai Faktor Pendukung Kesejahteraan Masyarakat*. *Bisnis Event*, 1(3), 58-70.

Widhianningrum, P., & Aji, S. (2019). *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo*. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 108-115.

Eko, S. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 2(1), 1-17.

Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009: tentang kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014: Tentang Desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan tanah kas desa.

Website

Prasetya, A. W. (2021). Berapa Jumlah Desa Wisata di Indonesia? diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2021/08/01/180600927/berapa-jumlah-desa-wisata-di-indonesia->

Kalurahan Tirtomartani. (nd). diakses dari <https://slemankab.go.id/layanan/kalurahan-tirtomartani/>

Name, J. S.-P. (1970). METODE PENELITIAN KUANTITATIF & KUALITATIF. diakses dari https://perpustakaan.iahntp.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1775

Setyaningrum, P. (2024). Mengenal Sultan Ground, dari Sejarah hingga Pemanfaatan Tanah Kasultanan Yogyakarta. diakses dari https://yogyakarta.kompas.com/read/2024/11/19/075300678/mengenal-sultan-ground-dari-sejarah-hingga-pemanfaatan-tanah-kasultanan?page=all#google_vignette

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Peneliti : Habbib Al Afzhar

NIM : [21520092]

Program Studi : Ilmu Pemerintahan “STPMD APMD”

Daftar Narasumber

Nama Narasumber :

Jabatan/Profesi :

Tanggal Wawancara :

Waktu :

Lokasi Wawancara :

Data yang tercantum di atas merupakan bukti keikutsertaan narasumber dalam wawancara penelitian. Informasi ini hanya digunakan untuk keperluan Akademik untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar sarjana S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Yogyakarta,.....

Peneliti

Mengetahui

Narasumber,

Habbib Al Afzhar

(21520092)

.....

.....

Daftar pertanyaan:

A. Perencanaan Pengelolaan Destinasi Usaha Wisata Umbul Sidomulyo

1. Bagaimana Sejarah awal mula bagaimana bisa berdiri pemikiran siapa?
2. bagaimana meyakinkan masyarakat proses perencanaan?
3. mengapa akhirnya masyarakat dan pemodal yakin jika usaha ini akan menjadi sebesar ini?
4. Apakah dari awal usaha ini memang bermaksud untuk memperkerjakan membantu perekonomian masyarakat sekitar?
5. Bagaimana peran dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan tirtomartani dalam perencanaan dan pelaksanaan desa wisata ini?
6. Apa dukungan dari pemerintah daerah terkait usaha ini, apakah pernah menawarkan untuk berkolaborasi?
7. Mengapa pemerintah belum terlibat langsung dalam desa wisata ini?
8. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan maupun Pelaksanaan usaha wisata ini?
9. Usaha ini memanfaatkan mata air/ sumber daya bagaimana strategi anda untuk menjaga agar sumber daya ini tidak rusak dan tetap berkelanjutan kedepannya?
10. Apa harapan Anda terhadap peran pemerintah dan pengelola wisata?
11. Siapa pelaku pelayanan desa wisata ini?

B. Pengorganisasian Pengelolaan Usaha Wisata Umbul Sidomulyo

1. Bagaimana struktur Pengelolaan dan pembagian tugas yang mengatur organisasi usaha wisata ini?
2. Bagaimana kerjasama mereka dalam mensukseskan usaha ini sampai sebesar ini ?
3. Apakah dalam Pembagian dan penetapan jabatan anda melihat mereka sesuai keahlian bidangnya masing-masing?
4. Apa strategi anda dalam memberdayakan masyarakat lokal agar bisa mengelola usaha ini dengan baik?

5. Ada isu bahwa sebagian tanah ini milik sultan Gron bagaimana sekarang legalitas terkait hal tersebut?
6. Sebagai ketua tentunya memiliki wewenang yang besar dalam menggerakkan dan jajarannya, arah apa yang anda lakukan biasanya apakah setiap hari anda menggerak sendiri/ diadakan evaluasi agar tujuan dari usaha ini dapat tercapai?
7. Bagaimana anda melakukan pembagian keuangan agar usaha ini berdampak terhadap masyarakat secara keseluruhan? Apakah ada uang dari hasil usaha ini disisihkan untuk kalurahan, RT atau dusun ini?
8. Apa tantangan dan kendala terbesar dalam pengelolaan usaha wisata ini dan bagaimana solusinya?

Note: Struktur Organisasi Usaha Wisata

Note: Surat izin Pembangunan Usaha/

Note: Pembagian saham dan keuntungan

Note: MoU Dokumen kerjasama

C. Pengawasan Pengelolaan Usaha Wisata Umbul Sidomulyo

1. Bagaimana pengawasan terhadap usaha wisata ini? Apakah dilakukan bersama-sama adanya pertemuan rutin atau hanya di serahkan kepada pengelola keuangan?
2. Siapa yang memiliki wewenang besar dalam pengawasan terkait sistem pengelolaan agar berjalan lancar?
3. Siapa yang memiliki wewenang besar pengawasan dalam hal keuangan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran?

D. Partisipasi Masyarakat dan Manfaat yang diperoleh Masyarakat

1. Apakah anda terlibat langsung pada saat pembangunan usaha ini?
2. Apa bentuk partisipasi yang anda lakukan dalam pembangunan dan pelaksanaan usaha ini?

3. Bagaimana kalian bisa yakin dan menanamkan rasa kepercayaan baik dengan pak budi maupun terhadap usaha ini?
4. Apa dampak yang anda rasakan setelah adanya usaha wisata ini?
5. Bagaimana pengaruh ekonomi maupun sosial dalam untuk anda? Apakah sangat berpengaruh atau tidak terlalu?
6. Apakah ada dampak negatif terhadap masyarakat akibat wisata ini?
7. Apakah ada konflik antarwarga terkait usaha di sekitar wisata?
8. Bagaimana pendapat Anda tentang transparansi dalam pengelolaan wisata?
- 9.

E. Pengunjung Wisata

1. Mengapa anda tertarik berkunjung di desa wisata umbul sidomulyo ini?
2. Bagaimana Anda menilai fasilitas dan pelayanan di sini?
3. Apakah Anda mendapatkan informasi tentang tempat ini dari media sosial atau sumber lain?
4. Apa daya tarik utama dan penilaian Anda terhadap fasilitas serta pelayanan?
5. Bagaimana pengalaman wisata Anda di sini dibandingkan tempat lain?

F. Peran dan kebijakan Pemerintah Daerah

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung Umbul Sidomulyo sebagai desa wisata?
2. Apakah pemerintah memiliki kebijakan atau peraturan khusus terkait pengelolaan wisata ini?
3. Bagaimana pendapat pemerintah terkait legalitas lahan yang sebagian milik sultan gron dan surat izin Usaha Wisata ?
4. Apa bentuk kontribusi desa dalam mendukung pembangunan dan keberlanjutan desa wisata umbul sidomulyo?
5. Apa kebijakan atau dukungan pemerintah untuk pengelolaan Wisata Umbul Sidomulyo?
6. Bagaimana kontribusi pemerintah dalam memfasilitasi usaha ini dan apakah kedepannya ada rencana untuk berkolaborasi antara pemerintah dan usaha

wisata ini agar menjadi desa wisata/ berkolaborasi dan memnfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakatnya?

7. Bagaimana relasi Pemerintah Daerah Dengan Pak Budi Karyono (selaku ketua Usaha Wisata)/ dengan masyarakat dusun Brintikan?
8. Bagaimana pemerintah memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan retribusi dan dana wisata?
9. Bagaimana tanggapan dan pengawasan anda terkait sumber daya yang dimanfaatkan oleh institusi lokal/ usaha wisata Umbul Sidmulyo pengelolaan sumber daya bersama memastikan bahwa sumber daya tidak rusak atau habis untuk keberlanjutan?
10. Mengapa pemerintah lokal belum mengatur dan mengurus desa wisata umbul sidomulyo?

Note: Dokumen legalitas atau izin lahan wisata.

Note: Surat keputusan atau kebijakan desa tentang pengelolaan wisata.

DOKUMENTASI INFORMAN



Dokumentasi Wawancara
Bersama Bapak Muhari, SH.
Sebagai Adyatama
Kemenparekraf Kab.Sleman



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak
Bekti Susanto, S.Si Sebagai Carik
Kalurahan Tirtomatani



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Budi
Karyono. Sebagai Ketua Organisasi Desa
Wisata Umbul Sidomulyo



Dokumentasi Wawancara
Bersama Bapak Priyanto.
Sebagai Bendahara Desa
wisata Umbul Sidomulyo



Dokumentasi Wawancara Bersama
Yoga Ikbil Prasetya. Sebagai Seksi
Humas/Pemasaran Desa Wisata Umbul
Sidomulyo



Dokumentasi Wawancara Bersama
Bapak Dnang Catur Wijara. Sebagai
Seksi Keamanan Desa Wisata Umbul
Sidomulyo



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu
Titin. Sebagai Pelaku
UMKM/Masyarakat Sekitar



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu
Dwi Suryanti. Sebagai Pelaku
UMKM/Masyarakat Sekitar

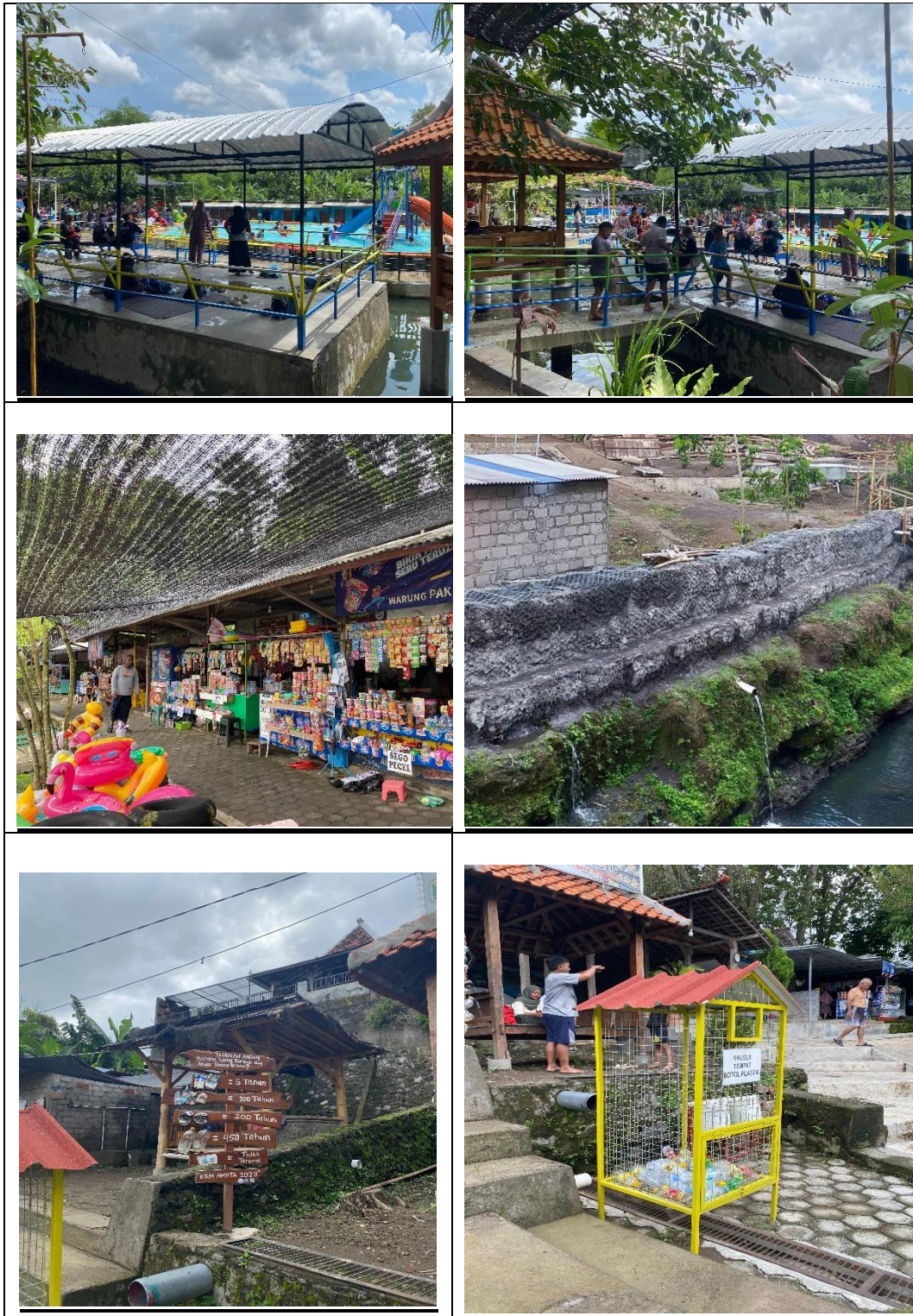


Dokumentasi Wawancara Bersama
Muhammad Aldy F. Sebagai Pemuda
Setempat/Masyarakat Sekitar



Dokumentasi Wawancara Bersama
Andika Rangga S. Sebagai Pemuda
Setempat/Masyarakat Sekitar

DOKUMENTASI DESA WISATA UMBUL SIDOMULYO



Desa Wisata Umbul Sidomulyo Kalurahan Tirtomartani



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 091/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Habib AL Afzhar
No. Mahasiswa : 21520092
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/AK-XIII/S1/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 - Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Habbib al Afzhar
No Mahasiswa : 21520092
Judul Skripsi : Pengelolaan Desa wisata Mandiri Umbul Sidomulyo terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal -
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si
Mulai Bimbingan : Senin 19 - oktober - 2024

| Tanggal | Uraikan Perbaikan | Paraf Dosen Pembimbing |
|-----------------|---|------------------------|
| 14/Oktober 2024 | Revisi judul, dan Teori yang digunakan | |
| 23/Oktober 2024 | Rumusan masalah, fokus Penelitian | |
| 30/Oktober 2024 | Pembuatan Pertanyaan wawancara /kabinet utara | |
| 06/November | Data wawancara | |
| 12/November | Tanda tangan / Acc proposal penelitian | |
| 19/November | Tanda tangan Pengumpulan proposal | |
| 11/Desember | Isi pembahasan /revisi pembahasan. | |
| 12/Desember | Pengecekan PPT Kualifikasi Data | |
| 6/Januari | Pengecekan Skripsi + Revisi keseluruhan | |
| 13/Januari | Pengumpulan Skripsi + fiksasi keseluruhan | |
| 16/ Januari | Revisi Intisari dan katipah wawancara | |



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id


SURAT TUGAS

Nomor : 448/IT/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Habbib Al Afzhar
Nomor Mahasiswa : 21520092
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kelurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Pengelolaan Usaha Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap kemakmuran Warga (Kelurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 20 November 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Kepada Yth :
Lurah Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman
Di tempat.

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

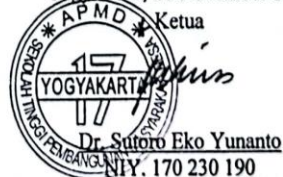
Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Habbib Al Afzhar
No Mhs : 21520092
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengelolaan Usaha Wisata Umbul Sidomulyo Terhadap kemakmuran Warga (Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman)
Tempat : Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 November 2024





Lumbung Desa STPM "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Tenoho 3 17 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPM "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah : Habbib Al Afzhar

Judul Makalah: PENGELOLAAN DESA WISATA UMBUL SIDOMULYO
TERHADAP KEMAKMURAN WARGA (KALURAHAN
TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN
SLEMAN)

Tanggal pemeriksaan: 17 Januari 2025

Persentase plagiasi: 6%



Petugas: Checked By:

Okie Fajaruiddin Patma

